

**“Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi di Indonesia Periode 2019-2023”**



Oleh:

PUTRI NURINDAH

22312237

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

**Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi di Indonesia Periode 2019-2023**

SKRIPSI

Di susun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai drajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Putri Nurindah

No Mahasiswa: 22312237

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 15 Juni 2026
Penulis,



Putri Nurindah

HALAMAN PENGESAHAN
Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di
Indonesia Periode 2019-2023

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Putri Nurindah
No Mahasiswa: 22312237

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 15 Juni 2026
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', written over a horizontal line.

(Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Disusun oleh : PUTRI NURINDAH

Nomor Mahasiswa : 22312237

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 07 Juli 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Arief Bachtiar, Drs., MSA., Ak., SAS.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

MOTTO

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

(Q.S Maryam ayat 4)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al Baqarah ayat 286)

“But they plan, and Allah plans. Allah is the best of planners”

(Q.S Al-Anfal ayat 30)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Determinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2019-2023” dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Salam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat wajib akademik untuk menyelesaikan Program Sarjana dan memperoleh gelar Strata-1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk, dan kekuatan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan pelita kehidupan bagi seluruh umat manusia.
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Zulkarnain dan Ibu Sriyati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Mama.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang berkenan membantu dan meluangkan waktu membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat dan masukan sehingga penulis bisa sampai pada saat ini.
9. Keluarga besar penulis, baik dari keluarga Ayah dan keluarga Mama yang tiada hentinya memberikan dukungan terus menerus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Hesti Mutia Ningrum, selaku saudara jauh penulis yang hadir memberikan dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap proses yang dilalui penulis. Terima kasih karena telah menjadi tempat penulis berbagi cerita

dan keluh kesah selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga atas segala doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

11. Vaya Zabrina Azahra, sahabat sekaligus teman kecil penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang selalu diberikan, terutama selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
12. Emelia, Lia, Fashan, dan Rifqi, sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah hadir dan kebersamai setiap proses selama masa perkuliahan, dari langkah pertama sebagai mahasiswa hingga akhirnya mencapai tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, serta momen yang telah dilalui bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penulis. Kehadiran kalian telah menjadi salah satu alasan yang membuat proses perkuliahan terasa lebih ringan dan bermakna. Terima kasih telah bertahan dan tumbuh bersama hingga titik ini.
13. Rifky Zikri Herfianza, yang hadir di tengah perjalanan penyusunan skripsi penulis dan memberikan warna serta makna tersendiri dalam proses tersebut. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Desa Paitan 71, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, bantuan, kebersamaan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian memberikan semangat dan kesan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 15 Juni 2026
Penulis,

Putri Nurindah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori <i>Resource-Based View</i> (RBV)	9
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.1.3 Tingkat Kekayaan Daerah.....	11
2.1.4 Dana Transfer Pusat	12
2.1.5 <i>Leverage</i>	13
2.2 Peneliti Terdahulu	14
2.3 Hipotesis Penelitian.....	17
2.3.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.3.2 Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.3.3 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.4 Kerangka Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Populasi dan Sampel	23

3.1.1 Populasi.....	23
3.1.2 Sampel.....	23
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	24
3.2.1 Sumber	24
3.2.2 Pengumpulan Data	24
3.3 Definisi dan pengukuran variabel penelitian.....	25
3.3.1 Variabel Dependen.....	25
3.3.2 Variabel Independen	26
3.3.3 Variabel Kontrol.....	28
3.4 Metode Analisis Data	29
3.4.1 Statistik Deskriptif	29
3.4.2 Estimasi dan Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	29
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4.4 Analisis Regresi Data Panel	33
3.4.5 Uji Koefisien Determinasi	34
3.4.6 Uji F	34
3.4.7 Uji T	35
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	37
4.3 Estimasi dan Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	40
4.3.1 Uji Chow	40
4.3.2 Uji Hausman	41
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	41
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4.1 Uji Normalitas.....	42
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	44
4.5 Analisis Regresi Linear Data Panel	47
4.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.7 Uji F	49
4.8 Uji T	50
4.9 Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan	61

5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Ketergantungan Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2024.	2
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Deskripsi Data Observasi	37
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Uji Chow (<i>Redudant Fixed Effects Tests</i>).....	40
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Uji Hausman (<i>Correlated Random Effects</i>).....	41
Tabel 4.5 Uji Normalitas	42
Tabel 4.6 Uji Normalitas	43
Tabel 4.7 Daftar Observasi <i>Outlier</i> Penelitian	43
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	22
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Seluruh <i>sample</i>	68
Lampiran 2. Perhitungan TKD.....	73
Lampiran 3. Perhitungan Dana Transfer	81
Lampiran 4. Perhitungan <i>Leverage</i>	89
Lampiran 5. Perhitungan KK	96
Lampiran 6. Perhitungan IPM	104
Lampiran 7. Statistik Deskriptif	109
Lampiran 8. Pemilihan Model.....	110
Lampiran 9. Asumsi Klasik.....	111

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kekayaan daerah, dana transfer pusat, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2023 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 160 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang di proksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, *leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, *Leverage*, *Resource-Based View*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya fiskalnya sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia (Remanta & Ramadhan, 2024).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur keuangannya secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Tumija & Sinta, 2022). Kinerja keuangan yang optimal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien, efektif, dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam perspektif *value for money*, Salah satu ukuran yang relevan dalam menilai

pelaksanaan anggaran adalah rasio efisiensi, yang menunjukkan sejauh mana instansi sektor publik mampu meminimalkan penggunaan sumber daya keuangan (*input*) untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Efisiensi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik, di mana setiap rupiah yang digunakan harus memiliki nilai yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat (Yulianto *et al.*, 2023).

Meskipun desentralisasi fiskal telah berjalan, temuan empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan antardaerah di Indonesia masih belum merata. Studi terbaru yang menganalisis 38 provinsi di Indonesia tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal yang signifikan antarwilayah (Nadofah *et al.*, 2025). Penelitian tersebut menemukan bahwa rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara nasional hanya sebesar 28,76%, sedangkan kontribusi dana transfer pemerintah pusat mencapai 65,71%. Temuan ini menunjukkan bahwa dana transfer pusat masih menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai peran dana transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah, berikut disajikan distribusi kapasitas fiskal provinsi di Indonesia tahun 2024.

Tabel 1.1 Distribusi Ketergantungan Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2024

Kategori Ketergantungan	Jumlah Provinsi	Persentase
Sangat Tinggi	25	66%
Tinggi	6	16%
Sedang dan Rendah	7	18%

Sumber: Nadofah *et al.* (2025)

Berdasarkan **Tabel 1.1**, sebanyak 66% provinsi di Indonesia berada dalam kategori ketergantungan fiskal sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana transfer pusat masih memiliki peran yang dominan dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagi daerah yang memiliki kemampuan PAD relatif rendah, dana transfer pusat menjadi sumber pendanaan yang penting untuk membiayai pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

Besarnya kontribusi dana transfer pusat tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan PAD, tetapi juga oleh dukungan sumber daya keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Secara teoritis dan empiris, terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor utama yang berperan signifikan adalah tingkat kekayaan daerah yang tercermin melalui besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal (Wahyudin & Hastuti, 2020). Daerah dengan kontribusi PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan. Hasil penelitian Verawaty *et al.* (2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), masih memegang peranan penting dalam struktur pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Dana transfer pusat merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah serta

mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui penyediaan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Ketersediaan dana transfer tersebut memberikan tambahan kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat (Sari *et al.*, 2020). Besarnya kontribusi dana transfer pusat dalam pendapatan daerah menunjukkan bahwa sumber pendanaan dari pemerintah pusat masih menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan dana transfer pusat yang optimal diduga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, *leverage* atau rasio utang terhadap ekuitas merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan utang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Namun, tingkat *leverage* yang tinggi tanpa pengelolaan yang *prudent* (bijaksana) berpotensi meningkatkan risiko fiskal dan menurunkan kinerja keuangan daerah (Banunaek *et al.*, 2022). Oleh karena itu, analisis *leverage* menjadi penting dalam mengkaji efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah umumnya masih berfokus pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan penelitian pada tingkat pemerintah provinsi masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan variabel tingkat kekayaan

daerah, dana transfer pusat, dan *leverage* dalam satu model analisis yang komprehensif pada tingkat pemerintah provinsi. Dari sisi metodologi, sebagian penelitian masih menggunakan pendekatan deskriptif sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan kinerja keuangan antarwaktu secara lebih mendalam. Padahal, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam koordinasi pembangunan regional dan pengelolaan anggaran dalam skala yang lebih besar.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2023 dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai proksi kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel pada 34 provinsi di Indonesia selama lima tahun agar mampu menangkap dinamika perubahan kinerja keuangan antarwaktu serta perbedaan karakteristik antarprovinsi secara lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah provinsi dalam kerangka desentralisasi fiskal dan perspektif *Resource-Based View* (RBV).

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Determinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori-teori akuntansi sektor publik dan keuangan daerah ke dalam analisis empiris, serta menambah referensi bacaan ilmiah bagi

pembaca yang tertarik pada bidang keuangan publik dan desentralisasi fiskal.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa yang melakukan kajian sejenis, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, ekonomi daerah, dan kebijakan fiskal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan metodologis bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian dengan topik kinerja keuangan atau desentralisasi fiskal.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap pengelolaan PAD, optimalisasi transfer pusat, serta pengendalian *leverage* agar tercapai peningkatan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai dasar pemikiran dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori desentralisasi fiskal, teori keagenan, dan konsep kinerja keuangan sektor publik. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian, kerangka pemikiran konseptual, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data yang akan dilakukan, variabel penelitian yang digunakan serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai hasil atas analisis data, berikut dengan temuan empiris, hasil pengujian hipotesis dan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan atas penelitian ini serta untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Resource-Based View* (RBV)

Resource-Based View (RBV) merupakan suatu pendekatan teoritis yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari pengoptimalan dan pengelolaan sumber daya internal yang dimilikinya. Organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika memiliki sumber daya strategis yang memenuhi karakteristik *Valuable* (bernilai), *Rare* (langka), *Inimitable* (tidak dapat ditiru), dan *Non-substitutable* (tidak tergantikan). Sumber daya tersebut tidak hanya berwujud aset fisik dan finansial, melainkan juga mencakup aset tidak berwujud seperti kapabilitas organisasi, motivasi, serta kompetensi sumber daya manusia (Manubawa *et al.*, 2025). Dalam perkembangannya, aspek pengetahuan juga dipandang sebagai aset strategis internal yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan sektor publik yang dinamis (Puryantini *et al.*, 2017).

Dalam konteks sektor publik, penerapan teori RBV sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola bauran kapasitas internalnya demi meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap efektivitas, transparansi, serta efisiensi pengelolaan anggaran daerah (Kurniawan & Juliana, 2026).

Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efisiensi mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya internalnya secara optimal. Dalam penelitian ini, tingkat kekayaan daerah yang tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merepresentasikan kapasitas daya saing internal dalam menggali potensi ekonomi lokal. Dana transfer pusat yang diproksikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) merepresentasikan sumber daya keuangan eksternal yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sementara itu, *leverage* menunjukkan proporsi pemanfaatan modal/utang eksternal yang jika tidak dikelola dengan baik berisiko mengurangi kemandirian keunggulan sumber daya internal daerah. Dengan demikian, teori RBV menjadi landasan yang relevan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan terhadap APBD ini menjadi cerminan dari keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta wujud nyata dari akuntabilitas publik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi pengelolaan anggaran ini adalah melalui laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah rasio efisiensi. Berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, anggaran harus dikelola secara efisien dengan membandingkan antara pengorbanan atau sumber daya yang digunakan (*efforts*) dengan hasil keluaran yang didapatkan (*outputs*). Dalam konteks ini, rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran belanja daerah terhadap total realisasi penerimaan pendapatan daerah (Aziz, 2016). Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi **Belanja Daerah**}}{\text{Realisasi **Pendapatan Daerah**}} \times 100\%$$

Semakin rendah rasio efisiensi (di bawah 100%), semakin efisien pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerah agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat (Verawaty *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini, tingkat kekayaan daerah diproksikan melalui besaran rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Karno & Alliyah, 2021). Ada pun ketentuan mengenai komponen pendapatan

ini secara mutakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dalam membiyai penyelenggaraan pemerintahan tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat. Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal serta meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas (Riani & Hrp, 2022).

2.1.4 Dana Transfer Pusat

Dana Transfer Pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, dana transfer pusat diprosikan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) karena DAU merupakan salah satu komponen dana transfer yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah sehingga daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih memadai dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Ketersediaan dana transfer tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama bagi daerah yang memiliki

kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif terbatas (Pradana & Handayani, 2023). Selain itu, dana transfer dari pemerintah pusat berperan dalam mendukung penyediaan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan antardaerah sehingga kapasitas keuangan daerah dapat meningkat (Harjito *et al.*, 2020).

Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan daerah sebagai proksi dana transfer pusat. Penggunaan proksi tersebut mengacu pada penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) yang menggunakan rasio DAU terhadap total pendapatan daerah. Meskipun pada penelitian terdahulu rasio tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, penelitian ini memandang rasio DAU terhadap total pendapatan sebagai indikator besarnya kontribusi dana transfer yang diterima pemerintah daerah. Oleh karena itu, variabel ini diinterpretasikan sebagai dana transfer pusat untuk menekankan fungsi DAU sebagai instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional maupun investasinya, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan eksternal (Adinata & Efendi, 2022). Dalam sektor publik, *leverage* juga digunakan oleh kreditur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban

keuangannya. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar beban utang yang harus ditanggung, yang dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dan menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Riani & Hrp, 2022). Selain itu, tingginya penggunaan utang mencerminkan adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya internal (Dasuki, 2021). Namun, jika dikelola secara tepat dan *prudent*, *leverage* dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas fiskal serta membangun infrastruktur strategis, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang (Siregar, 2020).

2.2 Peneliti Terdahulu

Berikut hasil penelitian terdahulu dengan topik serupa dijadikan referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Noviyanti & Kiswanto (2016)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah • Bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit	Tingkat Ketergantungan Pusat (DAU) & Belanja Daerah Berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah (PAD) & Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
2.	Kusuma & Handayani (2017)	• Terikat: Kinerja Keuangan	Tingkat Ketergantungan Pusat (DAU) & Belanja Daerah

		Pemerintah Daerah • Bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran (<i>Wealth</i>), Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, <i>Leverage</i>, & Belanja Daerah	berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran (<i>Wealth</i>), & <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
3.	Kiswanto & Fatmawati (2019)	• Terikat: Kinerja Pemerintah Daerah • Bebas: Ukuran Daerah, <i>Leverage</i>, Temuan Audit, & Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Ukuran daerah & Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah <i>Leverage</i> & Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah
4.	Migang & Zahro (2019)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, & Temuan Audit	Tingkat Kekayaan Daerah & Temuan Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Belanja Daerah & Tingkat Ketergantungan dengan Pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
5.	Siregar (2020)	• Terikat: Kinerja Keuangan • Bebas: Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah, <i>Leverage</i>, & Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Ukuran Daerah & Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua

6.	Sedek & Kusumawati (2024)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: <i>Leverage</i>, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, & Temuan Audit	Tingkat Ketergantungan pada Pusat & Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah <i>Leverage</i> & Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
7.	Dasmar <i>et al.</i> , (2020)	• Terikat: Kinerja Pemerintah Daerah • Bebas: Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i>, & Temuan Audit	Kekayaan Daerah & <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Belanja Daerah & Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
8.	Prayuda & Arifin (2024)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan Keuangan, <i>Leverage</i>, PAD, & IPM	Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan, & <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Jumlah Penduduk, PAD, & IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
9.	Pratama (2024)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: Rasio Kemandirian Daerah & Belanja Daerah	Belanja Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
10.	Saputra <i>et al.</i> , (2018)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: <i>Revenue Risk</i>, <i>Expenditures</i>, Audit	<i>Human Development Index</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

		<i>Opinion, Human Development Index</i>	
11.	Astuti & Mispiyanti (2019)	• Terikat: Kinerja Keuangan • Bebas: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, & Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
12.	Aulia & Sari (2023)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Bebas: PAD & DAU • Mediasi: Belanja Pegawai	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
13.	Karno & Alliyah (2021)	• Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah • Bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, & Opini Audit	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat kekayaan daerah diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula kapabilitas internal pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan

sumber daya secara optimal, sehingga fleksibilitas anggaran yang dimiliki akan mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Riani & Hrp, 2022).

Dalam kerangka *Resource-Based View*, PAD merupakan sumber daya finansial internal yang strategis karena mencerminkan kemampuan khas suatu daerah yang sulit ditiru oleh daerah lain. Keunggulan kompetitif dicapai ketika organisasi mampu mengelola sumber daya internalnya secara optimal untuk memperoleh nilai tambah (Dasuki, 2021). Oleh karena itu, daerah yang memiliki PAD tinggi menunjukkan kemampuan superior dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah (Kurniawan & Juliana, 2026).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Migang & Zahro (2019), Dasmar *et al.* (2020) dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana transfer merupakan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, dana transfer pusat diproksikan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula kapasitas besar proporsi DAU yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. DAU diberikan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Perspektif *Resource-Based View* (RBV) memandang bahwa keunggulan dan kinerja organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif (Dasuki, 2021). Dalam konteks pemerintah daerah, dana transfer pusat yang diproksikan melalui DAU dapat dipandang sebagai sumber daya eksternal yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, semakin besar dana transfer pusat yang diterima dan dikelola secara

optimal, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Kusuma & Handayani (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan sebagai proksi tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, semakin besar kontribusi dana transfer pusat yang diterima pemerintah daerah, semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Dana Transfer Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan proporsi pendanaan pemerintah daerah yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas (Kusuma & Handayani, 2017). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya kewajiban jangka panjang yang harus ditanggung pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mengalokasikan anggaran

untuk program pelayanan publik yang produktif (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

Perspektif *Resource-Based View* (RBV) memandang bahwa organisasi yang unggul adalah organisasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya internalnya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Dasuki, 2021). Dalam konteks pemerintah daerah, tingginya tingkat *leverage* menunjukkan besarnya penggunaan utang dalam membiayai operasional pemerintahan, yang mencerminkan bahwa kapasitas sumber daya internal belum mampu memenuhi kebutuhan pendanaan secara mandiri (Riani & Hrp, 2022). Ketergantungan yang tinggi terhadap utang dapat meningkatkan beban kewajiban daerah sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pelayanan publik dan pembangunan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Dasuki, 2021). Namun, apabila di kelola secara *prudent* dan digunakan untuk kegiatan yang produktif, *leverage* dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan strategis untuk meningkatkan kapasitas pembangunan dalam jangka panjang (Putri & Priyadi, 2021).

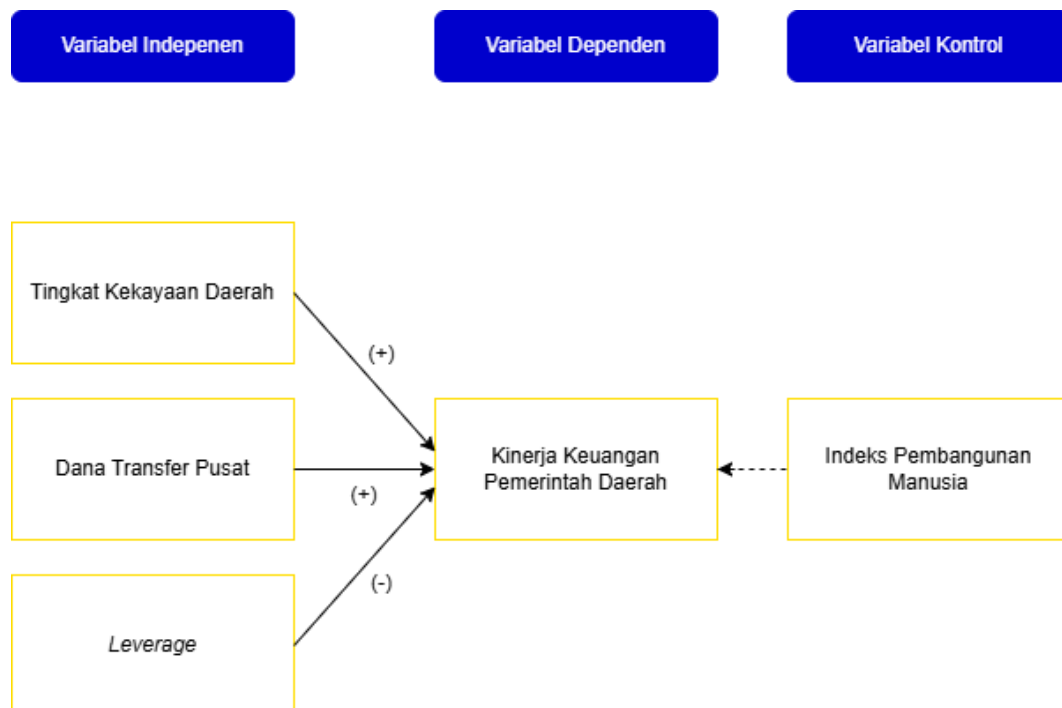
Penelitian terdahulu oleh Kiswanto & Fatmawati (2019) dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan landasan teori *Resource-Based View* (RBV). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu terkait tingkat kekayaan daerah, dana transfer, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan faktor makro-sosial yang berpotensi memengaruhi model linear. Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Menurut Setiawan *et al.* (2025), populasi merupakan keseluruhan kelompok yang menjadi fokus penelitian yang terdiri dari individu, objek, kejadian, atau apapun yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah provinsi di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang digunakan oleh peneliti untuk mewakili keseluruhan populasi yang diteliti (Firmansyah & Dede, 2022). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara lengkap dan konsisten selama periode tahun 2019-2023.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyaji informasi secara lengkap terkait komponen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibutuhkan dalam variabel penelitian selama periode tahun 2019-2023.

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber resmi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder dipilih karena telah tersedia dalam bentuk terstruktur dan dapat diakses melalui lembaga pemerintah maupun publikasi daring yang kredibel. Sumber utama data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi pemerintah Daerah djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id.

3.2.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berguna sebagai bahan analisis, baik berupa dokumen publik maupun dokumen privat yang relevan dengan tujuan penelitian (Firmansyah & Dede, 2022). Metode dokumen yang digunakan yaitu mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, serta laporan indeks capaian sosial pada setiap

provinsi di Indonesia yang dipublikasikan secara daring dari tahun 2019 sampai dengan 2023 melalui informasi publik.

3.3 Definisi dan pengukuran variabel penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan merupakan hasil dari adanya variabel bebas, di mana variabel ini tidak dimanipulasi melainkan diamati variasinya sebagai kondisi yang hendak dijelaskan oleh peneliti (Firmansyah & Dede, 2022). Sementara itu, variabel dependen juga merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen, dan merupakan variabel yang ingin diprediksi atau dipahami perubahannya oleh peneliti (Subhaktiyasa, 2024).

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi karena rasio tersebut mampu menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah. Rasio efisiensi dihitung dengan

membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pengeluaran secara lebih efisien dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Pengukuran rasio efisiensi mengacu pada penelitian A. Aziz (2016), dengan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\textit{Realisasi Belanja Daerah}}{\textit{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif, di mana jika terdapat perubahan pada variabel independen maka variabel dependen juga mengalami perubahan (Firmansyah & Dede, 2022). Variabel independen juga merupakan variabel yang berperan sebagai prediktor dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Subhaktiyasa, 2024). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu Tingkat Kekayaan Daerah (X_1), Dana Transfer Pusat (X_2), serta *Leverage* (X_3).

3.3.2.1 Tingkat Kekayaan Daerah

Mengacu pada penelitian terdahulu oleh Kusuma & Handayani (2017), variabel tingkat kekayaan daerah diproksikan melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi realisasi PAD dalam struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut

dalam mendanai kebutuhannya. Berdasarkan acuan tersebut, variabel tingkat kekayaan daerah dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\textbf{Tingkat Kekayaan} = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\textit{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.2.2 Dana Transfer Pusat

Dana transfer pusat dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan daerah. Pengukuran ini mengacu pada Noviyanti & Kiswanto (2016) yang menggunakan rasio DAU terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU dipilih sebagai proksi karena merupakan dana transfer yang bersifat umum (*unconditional grant*) dan memiliki porsi yang relatif besar dalam struktur transfer pemerintah pusat kepada daerah. Rasio tersebut digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi DAU terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan, semakin besar kontribusi dana transfer pusat terhadap kapasitas keuangan pemerintah daerah. Variabel dana transfer pusat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Dana Transfer Pusat} = \frac{\textit{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\textit{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.2.3 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan proporsi pendanaan pemerintah daerah yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki (Kusuma & Handayani, 2017). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya kewajiban jangka panjang yang harus ditanggung

pemerintah daerah, sehingga digunakan oleh kreditur untuk menilai risiko dan kemampuan daerah dalam melunasi kewajibannya (Adinata & Efendi, 2022). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan yang bersumber dari pihak eksternal (utang). Berdasarkan acuan tersebut, variabel *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$Leverage = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga perlu dikendalikan atau dikontrol dalam model penelitian untuk mengisolasi pengaruh murni dari variabel independen terhadap variabel dependen (Firmansyah & Dede, 2022). Variabel kontrol dikendalikan agar tidak memengaruhi hubungan antara dua variabel utama, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan hubungan yang sesungguhnya antara variabel independen dan variabel dependen yang sedang diamati (Subhaktiyasa, 2024).

3.3.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut Saputra *et al.* (2018), IPM berperan penting dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena

mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kapasitas pengawasan serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Variabel IPM diukur menggunakan nilai indeks absolut capaian tahunan Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin baik kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Dalam penelitian ini, data IPM dimasukkan ke dalam model regresi dalam bentuk nilai indeks aslinya dengan formula sebagai berikut:

$$IPM = \text{Nilai Indeks Capaian IPM Tahunan per Provinsi}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data secara sistematis melalui ukuran-ukuran numerik yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Febriani, 2022).

3.4.2 Estimasi dan Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel menggunakan *software* EViews, terdapat tiga pendekatan model estimasi yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Untuk menentukan model yang paling tepat dan efisien dalam menguji hipotesis, dilakukan serangkaian pengujian sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih pendekatan mana yang lebih baik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah dengan melihat nilai probabilitas *Cross-section F*. jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.4.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih pendekatan mana yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini dilihat dari nilai probabilitas *Cross-section Random*. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

3.4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan apabila pada Uji Chow model yang terpilih adalah CEM, dan pada Uji Hausman model yang terpilih adalah REM. Uji ini berfungsi untuk menentukan pilihan terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Jika nilai

probabilitas *Breusch-Pagan* $< 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan analisis regresi linear, sehingga menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Apabila seluruh asumsi klasik terpenuhi, maka model regresi dapat dikatakan valid, tidak bias, dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Hutagaol, 2025).

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal, karena model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Hutagaol, 2025). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Uji *Jarque-Bera* merupakan salah satu *goodness of fit test* yang digunakan untuk mengukur apakah *skewness* dan *kurtosis* data sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai *skewness* dan *kurtosis* dari distribusi normal sama dengan nol, sehingga nilai absolut dari parameter ini dapat menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal (Febriani, 2022). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $>$

0,05, maka data *residual* berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$, maka data *residual* tidak berdistribusi normal (Hutagaol, 2025).

3.4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antarvariabel independen, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen tersebut (Hutagaol, 2025). Mengingat penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) antarvariabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antarvariabel independen lebih kecil dari 0,08 ($< 0,08$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas (Hutagaol, 2025). Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan meregresikan nilai absolut *residual* terhadap seluruh variabel independen dalam model. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah apabila nilai signifikansi antara

variabel independen dengan absolut *residual* lebih besar dari 0,05 ($< 0,05$), maka model regresi dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai *DW* terletak antara d_U dan $4-d_U$ ($d_U < DW < 4-d_U$), maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi (Hutagaol, 2025).

3.4.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel adalah teknik analisis statistik yang menggabungkan data antar-tempat (*cross-section*) dan data runtut waktu (*time-series*) untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \beta_4(IPM) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah
- X1 = Tingkat kekayaan daerah
- X2 = Dana Transfer Pusat
- X3 = *Leverage*

IPM = Indeks pembangunan manusia

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

ε = *Error term*

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, di mana nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Hutagaol, 2025). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Febriani, 2022).

3.4.6 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi dinyatakan layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model regresi dinyatakan tidak layak (*not fit*) untuk digunakan dalam penelitian (Febriani, 2022).

3.4.7 Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, di mana uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Hutagaol, 2025). Secara parsial variabel independen memengaruhi secara signifikan atas variabel dependen dengan ketentuan nilai signifikan $< 0,05$. Untuk nilai signifikan $> 0,05$ artinya variabel independen tidak memengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial (Febriani, 2022).

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dianalisis dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai proksi pengukurannya. Analisis juga dilakukan terhadap tiga variabel independen yaitu tingkat kekayaan daerah, dana transfer pusat, dan *leverage*. Serta satu variabel kontrol yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM.

Objek penelitian mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023. Penelitian ini tidak menggunakan 38 provinsi yang ada saat ini karena empat provinsi hasil pemekaran baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan belum memiliki kelengkapan data yang memadai dan konsisten untuk periode pengamatan yang diteliti. Dengan demikian, total observasi dalam penelitian ini adalah 170 observasi ($34 \text{ provinsi} \times 5 \text{ tahun}$). Namun, sebelum melakukan pengujian model regresi data panel, peneliti melakukan deteksi data ekstrem (*outlier*). Berdasarkan hasil skrining data, terdapat 10 data observasi yang teridentifikasi sebagai *outlier* dan dikeluarkan dari sampel penelitian guna menghindari bias dan menjaga kenormalan distribusi data dalam hasil estimasi. Sehingga jumlah observasi akhir yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebanyak **160 observasi**. Rincian mengenai proses pemilihan sampel dan deskripsi data observasi disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Data Observasi

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Pemerintah Provinsi di Indonesia (Populasi Awal)	34	34	34	38	38	178
2.	Pengurangan: Provinsi baru hasil pemekaran yang tidak memiliki LKPD <i>audited</i> lengkap periode 2019-2023	0	0	0	(4)	(4)	(8)
3.	Jumlah Sampel Sesuai Kriteria Awal	34	34	34	34	34	170
4.	Pengurangan: Data observasi yang teridentifikasi sebagai <i>outlier</i>	(2)	(2)	0	(3)	(3)	(10)
5.	Jumlah Sampel Akhir yang Diobservasi	32	32	34	31	31	160

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memaparkan penjelasan tentang variabel-variabel penelitian melalui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Tabel Statistik Deskriptif ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel Peneliti	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Standar Deviation</i>
Tingkat Kekayaan Daerah	0,033	0,735	0,383	0,168
Dana Transfer Pusat	0,000	0,775	0,262	0,141
<i>Leverage</i>	0,003	0,294	0,057	0,048
Indeks Pembangunan Manusia	60,840	83,550	72,610	3,928
Kinerja Keuangan	0,094	1,348	0,901	0,153

Sumber: Data Sekunder EViews, 2026

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.2 diperoleh bahwa nilai minimum tingkat kekayaan daerah yaitu 0,033 diperoleh dari total PAD sebesar Rp 1.165.900.404.290 dengan total pendapatan sebesar Rp 35.143.100.183.325 yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum yaitu 0,735 diperoleh dari total PAD sebesar Rp 8.514.348.394.264 dengan total pendapatan sebesar Rp 11.576.544.862.694 yang dimiliki oleh Provinsi Banten pada tahun 2023. Rata-rata (*mean*) tingkat kekayaan daerah adalah 0,383 dengan standar deviasi 0,168.

Pada beberapa tahun Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 memiliki nilai dana tarnsfer pusat minimum nol (0) yang diperoleh dari DAU pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 sebesar Rp 0 dengan total pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 62.300.679.833.068, pada tahun 2020 sebesar Rp 55.887.004.237.727, pada tahun 2021 sebesar Rp 65.567.009.199.000, dan

pada tahun 2022 sebesar Rp 67.290.479.172.308. Sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki nilai dana transfer pusat maksimum sebesar 0,775 yang diperoleh dari DAU sebesar Rp 25.939.668.270.716 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 33.455.209.327.987 pada tahun 2019. Rata-rata (*mean*) dana transfer pusat adalah 0,262 dengan standar deviasi 0,141.

Leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,003 yang dimiliki oleh Provinsi Yogyakarta diperoleh dari total utang sebesar Rp 39.139.904.503 dengan total ekuitas sebesar Rp 12.528.014.950.939 pada tahun 2022. Nilai maksimum *leverage* sebesar 0,294 dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara diperoleh dari total utang sebesar Rp 1.574.834.026.699 dengan total ekuitas sebesar Rp 5.353.603.279.639 pada tahun 2023. Sedangkan untuk nilai rata-rata (*mean*) *leverage* sebesar 0,057 dengan standar deviasi 0,048.

Indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 60,840 yang dimiliki oleh Provinsi Papua pada tahun 2019. Nilai maksimum IPM adalah sebesar 83,550 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) IPM adalah sebesar 72,610 dengan standar deviasi 3,928.

Kinerja keuangan memiliki nilai minimum 0,094 yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari belanja daerah sebesar Rp 3.310.488.568.730 dan pendapatan Rp 35.143.100.183.325 pada tahun 2020. Nilai maksimum kinerja keuangan adalah sebesar 1,348 yang dimiliki oleh Provinsi Papua yang diperoleh dari belanja daerah sebesar Rp 5.031.849.735.511 dengan pendapatan Rp 3.733.670.617.987 pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) kinerja keuangan adalah sebesar 0,901 dengan standar deviasi 0,153.

4.3 Estimasi dan Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian regresi data panel memerlukan pemilihan model estimasi terbaik di antara tiga pendekatan yang tersedia, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Penetapan model terbaik dilakukan melalui dua pengujian utama, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil pengujian penentuan model estimasi data panel dipaparkan sebagai berikut:

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan dan memilih model estimasi yang paling tepat antara pendekatan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan pada nilai probabilitas (Prob.) *Cross-section F*. jika nilai Prob. $< 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian Chow menggunakan *software* EViews disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Uji Chow (*Redudant Fixed Effects Tests*)

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-Section F</i>	1,572657	(33,132)	0,0387
<i>Cross-Section Chi-square</i>	56,368189	33	0,0068

Sumber: Data Sekunder EViews, 2026

Berdasarkan hasil *output* pada Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Pada *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* adalah sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dan lebih layak digunakan dibandingkan pendekatan *Common Effect Model* (CEM).

4.3.2 Uji Hausman

Pada pengujian pertama, model FEM dinyatakan lebih unggul dibandingkan CEM, maka pengujian harus dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman. Uji Hausman bertujuan untuk menentukan pendekatan model estimasi yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Kriteria penilaian didasarkan pada nilai probabilitass *Cross-section random*, di mana jika nilai Prob. $< 0,05$ maka model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil Uji Hausman dipaparkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Uji Hausman (*Correlated Random Effects*)

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	12,980744	4	0,0114

Sumber: Data Sekunder *Eviews*, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4, terlihat bahwa nilai probabilitas untuk *Cross-section random* menunjukkan angka sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,011 < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak. Penolakan H_0 ini mengindikasikan bahwa residual dalam model memiliki korelasi dengan variabel independen, sehingga pendekatan *Random Effect Model* (REM) tidak efisien. Dengan demikian, Uji Hausman memutuskan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik untuk estimasi regresi data panel dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Sebagai bentuk konfirmasi tambahan, peneliti juga melampirkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) yang sejatinya digunakan untuk menguji kekuatan

Random Effect Model (REM) terhadap *Common Effect Model* (CEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai Prob. *Breusch-Pagan* untuk efek kombinasi (*both*) sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang menandakan REM lebih baik dari CEM. Namun, karena paja Uji Chow dan Uji Hausman pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) secara konsisten terpilih sebagai model yang paling valid dan superior, maka pengujian hipotesis dan analisis regresi data panel pada bab ini secara mutlak akan dijalankan menggunakan spesifikasi *Fixed Effect Model* (FEM).

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) dilakukan sebelum uji regresi data panel.

4.4.1 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas metode uji *Jarque-Bera* (J-B). Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
n	170
<i>Probability</i>	0,000

Sumber: Data Sekunder *Eviews*, 2026

Berdasarkan Tabel 4.5, bahwa nilai signifikansi uji *Jarque-Bera* (J-B) adalah sebesar 0,000 Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, dilakukan eliminasi data *outlier* dengan metode *Boxplot* (*Interquartile Ranger/IQR*). Data *outlier* merupakan data yang

memiliki nilai eskترم pada residual sehingga data tersebut harus dieliminasi untuk menjadikan data tersebut berdistribusi normal. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas setelah mengeliminasi data *outlier* di Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Uji Normalitas

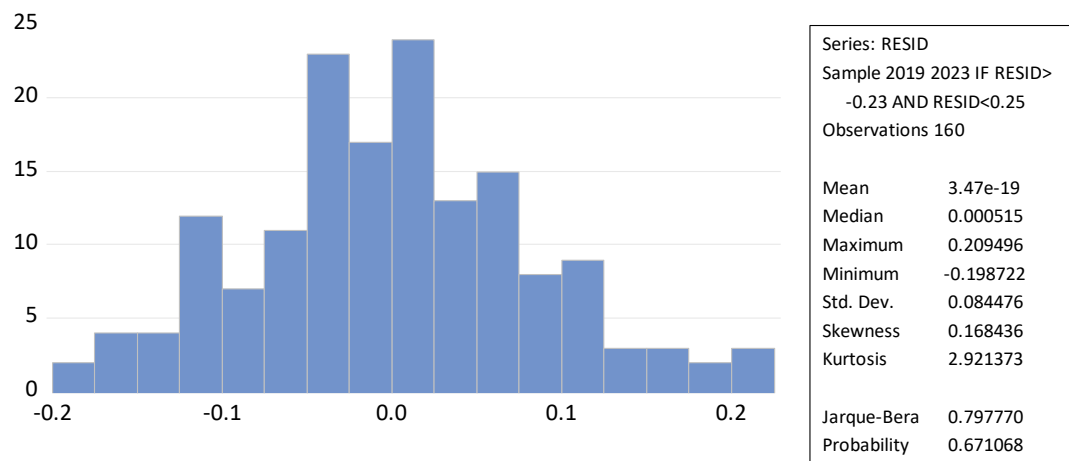
	<i>Unstandardized Residual</i>
n	160
<i>Probability</i>	0,671

Sumber: Data Sekunder *Eviews*, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansi uji *Jarque-Bera* (J-B) setelah data di eliminasi adalah sebesar 0,671 nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,671 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa **data residual berdistribusi normal**. Karena data awalnya yang sebelumnya sebanyak 170 data dikurangi sebanyak 10 data menjadi 160 data. Tampilan tabel data observasi *outlier* penelitian dan gambar uji histogram normalitas dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.7 Daftar Observasi Outlier Penelitian

No	Provinsi	Tahun	Keterangan
1.	Provinsi Jawa Barat	2020	<i>Outlier</i>
2.	Provinsi Jawa Barat	2022	<i>Outlier</i>
3.	Provinsi Jawa Timur	2019	<i>Outlier</i>
4.	Provinsi Kalimantan Selatan	2022	<i>Outlier</i>
5.	Provinsi Kalimantan Timur	2023	<i>Outlier</i>
6.	Provinsi Papua	2019	<i>Outlier</i>
7.	Provinsi Papua	2023	<i>Outlier</i>
8.	Provinsi Bangka Belitung	2022	<i>Outlier</i>
9.	Provinsi Kepulauan Riau	2020	<i>Outlier</i>
10.	Provinsi Papua Barat	2023	<i>Outlier</i>

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat atau sempurna antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki gejala multikolinearitas (Hutagaol, 2025). Mengingat model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), pengujian dilakukan menggunakan metode matriks korelasi (*correlation matrix*) antarvariabel independen. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas serius jika nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas $< 0,80$. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	X_1	X_2	X_3	IPM
Tingkat Kekayaan Daerah	1,000000	-0,575585	-0,029064	0,606111

Dana Transfer Pusat	-0,575585	1,000000	0,241774	-0,376087
<i>Leverage</i>	-0,029064	0,241774	1,000000	0,046046
Indeks Pembangunan Manusia	0,606111	-0,376087	0,046046	1,000000

Sumber: Data Sekunder *Eviews*, 2026

Berdasarkan Tabel 4.8, koefisien korelasi tertinggi berada pada hubungan antara variabel Tingkat Kekayaan Daerah (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu sebesar 0,606111. Nilai tersebut masih berada di bawah batas kritis 0,80. Karena tidak ada satu pun koefisien korelasi antarvariabel independen yang melampaui angka 0,80, maka disimpulkan model regresi data panel ini **bebas dari masalah multikolinearitas**.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Glejser. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Sig.
Tingkat Kekayaan Daerah	0,507

Dana Transfer Pusat	0,316
<i>Leverage</i>	0,311
Indeks Pembangunan Manusia	0,257

Sumber: Data Sekunder Eviews, 2026

Berdasarkan Tabel 4.9, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Prob.) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), yaitu variabel Tingkat Kekayaan Daerah (0,507), Dana Transfer Pusat (0,316), *Leverage* (0,311), dan IPM (0,257). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam sisaan homogen atau **tidak terdapat gejala heteroskedastisitas** di dalam model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan observasi lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Durbin-watson* (DW).

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi

<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>	<i>F-statistic</i>	<i>Prob (F-statistic)</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,219	0,199	10,585	0,000	0,929

Sumber: Data Sekunder Eviews, 2026

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil *Durbin-Watson test* sebesar 0,929. Dimana $0,929 \text{ (DW)} < 1,793 \text{ (dU)}$, serta $0,929 \text{ (DW)} < 2,207 \text{ (4-dU)}$. Sehingga nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan nilai DW lebih besar

daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada $4-dU$, atau sudah sesuai dengan konsep $dU < DW < 4-dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **tidak terdapat atau bebas dari autokorelasi.**

4.5 Analisis Regresi Linear Data Panel

Dengan menggunakan EViews 12, analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel tingkat kekayaan daerah (X_1), dana transfer pusat (X_2), *leverage* (X_3) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). berdasarkan dari hasil regresi data panel disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel

	T-Stat	B	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,417	0,512	0,017	-
Tingkat Kekayaan Daerah	3,086	0,248	0,002	Didukung
Dana Transfer Pusat	5,978	0,518	0,000	Didukung
<i>Leverage</i>	0,899	0,176	0,370	Tidak Didukung
IPM	0,683	0,002	0,496	-
	Adj R ² : 0,199			
	F: 10,858			
	Sig: 0,000			

Sumber: Data Sekunder EViews, 2026

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel pada Tabel 4.11, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,512 + 0,248X_1 + 0,518X_2 + 0,176X_3 + 0,002(IPM) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Tingkat Kekayaan Daerah

X₂ = Dana Transfer Pusat

X₃ = *Leverage*

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 4.11 menunjukkan hasil estimasi model regresi data panel. Berdasarkan hasil tersebut, interpretasi koefisien regresi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi β_1 sebesar 0,248, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat untuk setiap adanya penambahan X₁ (Tingkat Kekayaan Daerah). Jadi apabila Tingkat Kekayaan Daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,248 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- b. Koefisien regresi β_2 sebesar 0,518, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat untuk setiap tambahan X₂ (Dana Transfer Pusat). Jadi apabila Dana Transfer Pusat mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,518 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi β_3 sebesar 0,176, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat untuk setiap tambahan X₃ (*Leverage*). Jadi apabila *Leverage* mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah akan meningkat sebesar 0,176 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- d. Koefisien regresi β_4 sebesar 0,002, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat untuk setiap tambahan IPM. Jadi apabila IPM mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,002 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah model regresi data panel dalam menjelaskan variasi variabel dependen apakah terdapat hubungan antara dua variabel, baik hubungan positif, negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Berikut disajikan hasil dari pengujian untuk mengetahui hasil dari koefisien determinasi pada tabel berikut:

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi pada *Adjust R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,199 atau 19,9%, sedangkan sisanya sebesar 80,13% dijelaskan diluar faktor variabel independen lainnya yang memengaruhi kinerja keuangan.

4.7 Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi kelayakan (*goodness of fit*) model regresi dalam penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun telah layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan

dalam uji F adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.10 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dinyatakan layak (*fit*) digunakan dalam penelitian.

4.8 Uji T

Uji parsial (uji T) menunjukkan apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil keputusan pengujian jika didapatkan nilai prob $t < 0,05$ (alfa) maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika nilai prob $t > 0,05$ maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, pengujian untuk uji t dapat dijabarkan dengan sebagai berikut:

- a. **Tingkat kekayaan daerah** memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$) dengan t hitung = 3,086 dan koefisien regresi sebesar 0,248. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah **didukung**.
- b. **Dana transfer pusat** memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan t hitung = 5,978 dan koefisien regresi sebesar 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer pusat berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa dana transfer pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, **didukung**.

- c. **Leverage** memiliki nilai signifikan sebesar 0,370 ($> 0,05$) dengan t hitung = 0,899 dan koefisien regresi sebesar 0,176. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, **tidak didukung**.
- d. **IPM** memiliki nilai signifikan sebesar 0,496 ($< 0,05$) dengan t hitung = 0,683 dan koefisien regresi sebesar 0,002. Dengan demikian, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

4.9 Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H_1 Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,248. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis pertama dalam penelitian ini **didukung**.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), PAD merupakan sumber daya keuangan internal yang dimiliki pemerintah daerah. Teori RBV menjelaskan bahwa organisasi yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif akan menghasilkan kinerja yang lebih baik (Dasuki, 2021). Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pendanaan bagi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat kekayaan daerah yang tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran

secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Migang & Zahro (2019), Siregar (2020), Karno & Alliyah (2021), dan Aulia & Sari (2023) yang menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang dimiliki daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri, mengurangi keterbatasan fiskal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan tingkat kekayaan daerah yang tercermin dari PAD mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H₂ Dana Transfer Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana transfer pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar 1,518. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa dana transfer pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini **didukung**.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan. Dana transfer pusat merupakan sumber pendanaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas.

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), dana transfer pusat dapat dipandang sebagai sumber daya keuangan eksternal yang mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dasuki, 2021). Meskipun berasal dari luar organisasi, sumber daya tersebut tetap dapat memberikan manfaat apabila dikelola dan dimanfaatkan secara efektif. Keberadaan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yang lebih memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa dana transfer pusat mampu memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Ketersediaan dana yang memadai memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan

anggaran secara lebih optimal, menjaga stabilitas keuangan daerah, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan. Dengan demikian, dana transfer pusat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016), Kusuma & Handayani (2017), Dasmar *et al.* (2020), serta Prayuda & Arifin (2024) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa DAU sebagai salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan secara lebih optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H₃ *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil

pengujian pada Tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,370 ($>0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,176. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini **tidak didukung**.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan *leverage* belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, besar kecilnya kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah tidak menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kinerja keuangan daerah.

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), *leverage* dapat dipandang sebagai sumber daya keuangan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Dasuki, 2021). Namun, teori RBV menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, melainkan juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan sumber pendanaan melalui utang belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan apabila penggunaannya tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Tidak signifikkannya pengaruh *leverage* menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengandalkan

sumber pendanaan utama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, tingkat *leverage* pemerintah daerah relatif rendah karena kebijakan pembiayaan daerah yang cenderung berhati-hati dalam penggunaan utang. Kondisi tersebut menyebabkan variasi *leverage* antardaerah tidak cukup besar untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan utang bukan merupakan faktor yang secara langsung menentukan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka RBV, sumber daya eksternal berupa utang hanya akan memberikan manfaat apabila mampu diintegrasikan dengan kapabilitas organisasi yang memadai dan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Oleh karena itu, peningkatan *leverage* tidak selalu diikuti oleh peningkatan maupun penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusuma & Handayani (2017) serta Sedek & Kusumawati (2024) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang oleh pemerintah daerah belum menjadi faktor yang mampu menjelaskan perbedaan kinerja keuangan antardaerah. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah lebih di pengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sumber daya

keuangan yang dimiliki dibanding oleh tingkat *leverage* yang dimiliki daerah.

4. Pengaruh IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian variabel kontrol Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,496 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak secara langsung diikuti oleh perubahan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif *Ressource-Based View* (RBV), kualitas sumber daya manusia merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai strategis bagi organisasi (Dasuki, 2021). Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing wilayah. Namun, RBV

juga menjelaskan bahwa manfaat dari aset strategis tersebut umumnya diperoleh dalam jangka panjang setelah sumber daya tersebut berhasil diolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka pendek.

Tidak signifikannya pengaruh IPM menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan dan fiskal, seperti kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan, mengelola belanja, serta memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Sementara itu, IPM lebih mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang manfaat ekonominya cenderung dirasakan dalam jangka panjang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM tidak secara otomatis meningkatkan maupun menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun kualitas sumber daya manusia merupakan aset penting bagi pembangunan daerah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan memerlukan proses yang lebih panjang dan didukung oleh kebijakan pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia belum tentu langsung tercermin dalam peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Prayuda & Arifin (2024) yang menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan perbedaan kinerja keuangan antardaerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan dibandingkan oleh tingkat IPM yang dimiliki daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, dana transfer pusat, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2023 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin baik kinerja keuangan yang dicapai. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.
2. Dana transfer pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mendukung

pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara lebih optimal.

3. *Leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat utang pemerintah daerah belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki dibandingkan dengan tingkat *leverage* yang dimiliki daerah.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM belum memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung dirasakan dalam jangka Panjang sehingga belum tercermin secara langsung dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang tepat dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan PAD diharapkan

dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga dana yang diterima dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
3. Pemerintah daerah perlu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang daerah serta memastikan bahwa penggunaan utang diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
4. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dalam penelitian ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah periode pengamatan, menggunakan cakupan sampel yang lebih luas, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, tingkat kemandirian daerah, dana bagi hasil, maupun variabel tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintah daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–14. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4477>
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan indeks. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 384–397. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i1>
- Aulia, R., & Sari, I. (2023). Pengaruh PAD dan DAU terhadap kinerja keuangan keuangan pemda dengan belanja pegawai variabel intervening. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 152–167. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/6819/5579>
- Aziz, A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran Pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2(16), 39–57. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>
- Dasuki, R. E. (2021). Manajemen strategi: Kajian teori resource based view. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XII(3), 447–454. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>
- Febriani, S. (2022). Analisis deskriptif standar deviasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 910–913. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.8194>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Harjito, Y., Nugraha, G. P. S., & Yualinto. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>

- Hutagaol, K. (2025). Kajian tentang uji asumsi klasik berbantuan SPSS. *Jurnal Padagogik*, 8(2), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35974/jpd.v8i2.4173> KAJIAN
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit badan pemeriksa keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/DOI: 10.32938/jie.v0iNo 1.1264>
- Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>
- Kurniawan, A., & Juliana, A. (2026). Dampak keterlibatan pemangku kepentingan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Sebuah tinjauan sistematis literatur. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 8000–8018. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15000>
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/778/792>
- Manubawa, I. B. G. A., Novitasari, I. G. A., & Masari, N. M. G. (2025). Pengaruh kepemimpinan, insentif, dan motivasi pada kinerja pegawai bidang akuntansi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (Rambis)*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/rambis.v5i1.4375>
- Migang, S., & Zahro, U. L. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(02), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/jebi.v22i2.950>
- Nadofah, Jaenudin, M., & Utami, A. F. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah di Indonesia: Evaluasi 38 Provinsi dalam era desentralisasi. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(01), 34–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v15i1.5081>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Pratama, D. H. (2024). *Pengaruh rasio kemandirian daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadu Provinsi Kalimantan Barat* (Vol. 2) [Institut Pemerintah Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/7961/1/Doni_Hakiki_Pratama_29.1012_Pengaruh_Rasio_Kemandirian_Daerah_Dan_Belanja_Daerah_Terdapat_Kinerja_Kuangan_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Sekadau_Provinsi_Kalimantan_Barat.pdf
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Analisis Faktor-Faktor Potensial Yang

- Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Action Research Literate*, 8(12), 3452–3458. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ar1.v8i12.2516>
- Puryantini, N., Arfati, R., & Tjahjadi, B. (2017). Pengaruh knowledge management terhadap kinerja organisasi dimediasi inovasi di organisasi penelitian pemerintah. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 21–38. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94662>
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–16. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4183/4195>
- Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen*, 05(04), 457–465. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1193>
- Riani, D., & Hrp, J. P. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, leverage, ukuran pemerintah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Sumatera Utara. *Journal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan*, 3(1), 311–318. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1282>
- Saputra, D. A., Ardila, L. N., Siddi, P., & Sutopo, B. (2018). Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 94–104. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art2>
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 219–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1547>
- Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9081–9100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8961>
- Setiawan, M. Y., Maritasari, D. B., & Watoni, M. (2025). Pendekatan dan strategi dalam penelitian populasi dan sampel. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 21250–21257. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2188>
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif: Sebuah studi pustaka. *Journal of Education Research*, 5(4), 5599–5609. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1747>
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur

- kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2806>
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.
<https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
<https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2364>
- Yulianto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran kinerja melalui pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 7(1), 233–245.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Seluruh sample

Daerah	Tahun	X1	X2	X3	Y	IPM
Provinsi Aceh	2019	0,171329	0,147419	0,106771	0,790312	71,9
Provinsi Sumatera Utara	2019	0,440478	0,20748	0,02656	1,027579	71,74
Provinsi Sumatera Barat	2019	0,364368	0,324928	0,027291	1,025185	72,39
Provinsi Riau	2019	0,408838	0,177931	0,009999	0,998524	73
Provinsi Jambi	2019	0,360879	0,313255	0,048183	1,054462	71,26
Provinsi Sumatera Selatan	2019	0,376534	0,187888	0,011932	0,692053	70,02
Provinsi Bengkulu	2019	0,281751	0,454721	0,076997	1,062795	71,21
Provinsi Lampung	2019	0,415312	0,262389	0,128019	0,768356	69,57
Provinsi DKI Jakarta	2019	0,733658	0	0,020891	1,02887	80,76
Provinsi Jawa Barat	2019	0,589498	0,089146	0,01106	0,994317	72,03
Provinsi Jawa Tengah	2019	0,558315	0,146347	0,01076	0,713731	71,73
Provinsi DI Yogyakarta	2019	0,365444	0,237062	0,003985	0,793751	79,99
Provinsi Jawa Timur	2019	0,577702	0,775355	0,02053	0,775355	71,5
Provinsi Kalimantan Barat	2019	0,387442	0,295647	0,020681	0,788801	67,65
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	0,355944	0,321355	0,024936	0,864286	79,91
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	0,051776	0,175845	0,085679	0,818826	70,72
Provinsi Kalimantan Timur	2019	0,556756	0,069273	0,062677	0,551013	76,61
Provinsi Sulawesi Utara	2019	0,326395	0,371409	0,026867	0,932637	72,99
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	0,264248	0,396688	0,017036	0,992883	69,5
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	0,432282	0,270142	0,028112	0,756853	71,66
Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	0,270834	0,387488	0,0425	0,898511	71,2
Provinsi Bali	2019	0,605392	0,199509	0,015712	0,662644	75,38

Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	0,347745	0,3047	0,004403	0,841819	68,14
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	0,23514	0,350233	0,006262	0,888737	65,23
Provinsi Maluku	2019	0,155297	0,546723	0,039323	0,887462	69,45
Provinsi Papua	2019	0,133048	0,17169	0,010377	0,676029	60,84
Provinsi Maluku utara	2019	0,161243	0,502074	0,022458	0,920646	68,7
Provinsi Banten	2019	0,626887	0,101769	0,015514	1,010955	72,44
Provinsi Bangka Belitung	2019	0,306844	0,388561	0,033462	1,030388	71,3
Provinsi Gorontalo	2019	0,223292	0,537396	0,031651	0,916921	68,49
Provinsi Kepulauan Riau	2019	0,332966	0,302087	0,069083	0,80037	75,48
Provinsi Papua Barat	2019	0,042657	0,128444	0,021795	0,477055	64,7
Provinsi Sulawesi Barat	2019	0,165037	0,520736	0,067709	0,924623	65,73
Provinsi Kalimantan Utara	2019	0,251275	0,463404	0,064228	0,816769	71,15
Provinsi Aceh	2020	0,178033	0,135492	0,111441	0,685593	73,29
Provinsi Sumatera Utara	2020	0,428235	0,191576	0,096958	0,846651	73,62
Provinsi Sumatera Barat	2020	0,354345	0,297188	0,037176	0,886694	74,29
Provinsi Riau	2020	0,386553	0,166111	0,00714	0,759423	73,67
Provinsi Jambi	2020	0,348856	0,292781	0,044902	0,840225	72,29
Provinsi Sumatera Selatan	2020	0,363754	0,017094	0,027381	0,743704	71,62
Provinsi Bengkulu	2020	0,255602	0,43774	0,071793	0,968255	72,93
Provinsi Lampung	2020	0,404923	0,246826	0,084315	0,817166	71,04
Provinsi DKI Jakarta	2020	0,669471	0	0,029901	0,925383	81,92
Provinsi Jawa Barat	2020	0,5368	0,08592	0,055214	1,105009	72,61
Provinsi Jawa Tengah	2020	0,538254	0,135416	0,022657	0,748408	71,88
Provinsi DI Yogyakarta	2020	0,334439	0,218773	0,003972	0,774719	79,95
Provinsi Jawa Timur	2020	0,567512	0,115801	0,019116	0,824441	73,04
Provinsi Kalimantan Barat	2020	0,380248	0,276035	0,015018	0,871042	68,76
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	0,329375	0,30193	0,029666	0,937024	72,62
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	0,453224	0,168169	0,091064	0,830355	73,09
Provinsi Kalimantan Timur	2020	0,521975	0,082048	0,075248	0,58395	75,94
Provinsi Sulawesi Utara	2020	0,304882	0,361911	0,141996	1,141251	73,67
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	0,256838	0,362593	0,018467	0,927985	70,31
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	0,415378	0,250921	0,108912	0,816435	73,08
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	0,253503	0,362539	0,058215	0,94519	71,61
Provinsi Bali	2020	0,536777	0,210673	0,015452	0,859817	76,52
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	0,350906	0,285167	0,022337	0,881181	70,46
Provinsi Nusa Tenggara	2020	0,215237	0,316647	0,023919	0,976049	66,93

Timur						
Provinsi Maluku	2020	0,179181	0,50051	0,053532	0,912991	71,34
Provinsi Papua	2020	0,106556	0,017881	0,010586	0,731412	61,22
Provinsi Maluku utara	2020	0,17329	0,473045	0,044507	0,968765	69,3
Provinsi Banten	2020	0,571557	0,100925	0,122673	0,778206	74,41
Provinsi Bangka Belitung	2020	0,284141	0,39177	0,026608	0,916171	72,74
Provinsi Gorontalo	2020	0,222727	0,506951	0,033239	0,855898	69,51
Provinsi Kepulauan Riau	2020	0,033176	0,03128	0,076153	0,0942	77,69
Provinsi Papua Barat	2020	0,056972	0,152578	0,042858	0,627223	65,94
Provinsi Sulawesi Barat	2020	0,172954	0,483081	0,065296	0,886886	68,4
Provinsi Kalimantan Utara	2020	0,22897	0,444431	0,062374	0,982395	71
Provinsi Aceh	2021	0,179654	0,139513	0,016587	0,7778	73,48
Provinsi Sumatera Utara	2021	0,456228	0,175551	0,088325	0,94238	73,84
Provinsi Sumatera Barat	2021	0,380537	0,281393	0,037378	0,964637	74,56
Provinsi Riau	2021	0,431682	0,155109	0,009716	0,754736	73,89
Provinsi Jambi	2021	0,390084	0,271891	0,041732	0,75693	72,62
Provinsi Sumatera Selatan	2021	0,402179	0,162626	0,0455	1,046762	71,83
Provinsi Bengkulu	2021	0,322575	0,397727	0,056276	0,943794	73,18
Provinsi Lampung	2021	0,43506	0,231114	0,088254	0,803413	71,25
Provinsi DKI Jakarta	2021	0,634562	0	0,038082	0,933876	82,25
Provinsi Jawa Barat	2021	0,54968	0,081313	0,107265	0,694525	72,96
Provinsi Jawa Tengah	2021	0,551777	0,128899	0,009851	0,970368	72,17
Provinsi DI Yogyakarta	2021	0,333314	0,21477	0,004074	0,969678	80,22
Provinsi Jawa Timur	2021	0,552377	0,106485	0,016561	0,987522	73,48
Provinsi Kalimantan Barat	2021	0,389863	0,244469	0,010344	0,801782	68,99
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	0,356097	0,275281	0,033786	0,881745	72,81
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	0,05389	0,165081	0,09782	0,792368	73,45
Provinsi Kalimantan Timur	2021	0,598027	0,081021	0,051156	0,65743	76,6
Provinsi Sulawesi Utara	2021	0,331107	0,336144	0,206006	1,099772	74,03
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	0,318217	0,317981	0,023669	0,924149	70,54
Provinsi Sulawesi Selatan	2021	0,446491	0,233694	0,10184	1,015773	73,38
Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	0,303316	0,321603	0,114857	0,99263	71,82
Provinsi Bali	2021	0,526252	0,20285	0,135638	0,85614	76,69
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	0,035378	0,277022	0,05442	0,917608	70,86
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	0,233044	0,325031	0,062677	0,960197	67,02
Provinsi Maluku	2021	0,16854	0,466247	0,14604	1,168553	71,55
Provinsi Papua	2021	0,154091	0,16671	0,006705	1,07012	61,4

Provinsi Maluku utara	2021	0,191991	0,424939	0,076068	0,993113	69,56
Provinsi Banten	2021	0,603131	0,092095	0,094199	0,708291	74,68
Provinsi Bangka Belitung	2021	0,330668	0,346832	0,076916	0,781075	72,96
Provinsi Gorontalo	2021	0,258899	0,476759	0,028475	0,843374	69,82
Provinsi Kepulauan Riau	2021	0,361106	0,286867	0,083665	0,972162	77,87
Provinsi Papua Barat	2021	0,066051	0,178478	0,01519	0,818016	66,11
Provinsi Sulawesi Barat	2021	0,201512	0,479543	0,082878	0,89689	68,64
Provinsi Kalimantan Utara	2021	0,259744	0,413059	0,061429	0,785608	71,57
Provinsi Aceh	2022	0,212719	0,141593	0,017788	0,928017	74,11
Provinsi Sumatera Utara	2022	0,576289	0,193177	0,105866	0,993223	74,51
Provinsi Sumatera Barat	2022	0,465246	0,30636	0,025911	1,028452	75,16
Provinsi Riau	2022	0,532594	0,164679	0,014582	0,796047	74,45
Provinsi Jambi	2022	0,459791	0,272176	0,051126	0,817639	73,11
Provinsi Sumatera Selatan	2022	0,49128	0,155729	0,03887	0,962799	72,48
Provinsi Bengkulu	2022	0,368487	0,409656	0,029725	1,024593	73,68
Provinsi Lampung	2022	0,538004	0,251454	0,083747	0,794691	73,68
Provinsi DKI Jakarta	2022	0,677784	0	0,029189	0,956753	82,77
Provinsi Jawa Barat	2022	0,699529	0,089712	0,009619	0,592328	73,63
Provinsi Jawa Tengah	2022	0,672983	0,14216	0,008481	0,990992	72,8
Provinsi DI Yogyakarta	2022	0,409212	0,220373	0,003124	0,985309	80,65
Provinsi Jawa Timur	2022	0,666253	0,112739	0,013998	0,987407	74,05
Provinsi Kalimantan Barat	2022	0,52721	0,254495	0,02001	0,745046	69,71
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	0,46162	0,26024	0,051501	0,941601	73,17
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	0,558885	0,133446	0,080391	0,645007	74
Provinsi Kalimantan Timur	2022	0,420952	0,04904	0,032899	0,475372	77,36
Provinsi Sulawesi Utara	2022	0,393046	0,327624	0,194768	1,035469	74,52
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	0,318584	0,304141	0,027153	0,985619	71,01
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	0,541095	0,260213	0,108901	0,996218	73,96
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	0,315625	0,322937	0,124383	1,081054	72,38
Provinsi Bali	2022	0,65636	0,202969	0,171426	0,891763	77,4
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	0,432252	0,278218	0,10871	0,945803	71,65
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	0,308087	0,391041	0,121869	0,965979	67,63
Provinsi Maluku	2022	0,218812	0,521552	0,14766	1,047216	72,04
Provinsi Papua	2022	0,201697	0,209683	0,006378	1,037549	62,16
Provinsi Maluku utara	2022	0,252284	0,395272	0,180917	0,980354	70,26
Provinsi Banten	2022	0,732054	0,095495	0,081392	0,72166	75,25
Provinsi Bangka Belitung	2022	0,378445	0,326509	0,081395	0,675343	73,5

Provinsi Gorontalo	2022	0,276068	0,508983	0,06356	0,93967	70,62
Provinsi Kepulauan Riau	2022	0,427685	0,27883	0,095588	0,980718	78,48
Provinsi Papua Barat	2022	0,079891	0,168285	0,013652	0,724526	66,72
Provinsi Sulawesi Barat	2022	0,241718	0,511899	0,118933	0,984269	69,19
Provinsi Kalimantan Utara	2022	0,298615	0,395604	0,034183	0,778697	72,21
Provinsi Aceh	2023	0,282543	0,190679	0,02892	0,907738	74,7
Provinsi Sumatera Utara	2023	0,566373	0,210288	0,13068	1,077637	75,13
Provinsi Sumatera Barat	2023	0,444577	0,317589	0,042173	1,014226	75,64
Provinsi Riau	2023	0,588573	0,150478	0,012329	0,786215	74,95
Provinsi Jambi	2023	0,388303	0,285626	0,023093	0,853795	73,73
Provinsi Sumatera Selatan	2023	0,526761	0,164663	0,056344	0,977919	73,18
Provinsi Bengkulu	2023	0,345652	0,420007	0,034268	1,044266	74,3
Provinsi Lampung	2023	0,539004	0,257767	0,132128	1,008826	72,48
Provinsi DKI Jakarta	2023	0,691471	0,000312	0,024963	0,939564	83,55
Provinsi Jawa Barat	2023	0,700989	0,094872	0,082162	1,021287	74,24
Provinsi Jawa Tengah	2023	0,670583	0,140263	0,010649	1,016973	73,39
Provinsi DI Yogyakarta	2023	0,405557	0,217063	0,002636	0,976936	81,09
Provinsi Jawa Timur	2023	0,660901	0,112462	0,011803	1,01531	74,65
Provinsi Kalimantan Barat	2023	0,511931	0,26748	0,014296	1,071265	70,48
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	0,384817	0,220121	0,021326	0,939995	73,73
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	0,492182	0,114561	0,037319	0,935013	74,66
Provinsi Kalimantan Timur	2023	0,58221	0,048331	0,020931	1,111204	78,2
Provinsi Sulawesi Utara	2023	0,412851	0,389191	0,158597	0,949262	75,04
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	0,37739	0,340534	0,0284	1,105246	71,66
Provinsi Sulawesi Selatan	2023	0,544011	0,265005	0,124231	0,99537	74,6
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	0,351362	0,326997	0,083181	1,084584	72,94
Provinsi Bali	2023	0,683156	0,183577	0,14803	0,975353	78,01
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	0,481211	0,276042	0,097609	0,980612	72,37
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	0,308555	0,401527	0,118781	0,964542	68,4
Provinsi Maluku	2023	0,216603	0,514504	0,12255	0,972703	72,75
Provinsi Papua	2023	0,206477	0,220758	0,002943	1,347695	63,01
Provinsi Maluku utara	2023	0,256503	0,403502	0,294163	0,983824	70,98
Provinsi Banten	2023	0,735483	0,095776	0,067556	1,020523	75,77
Provinsi Bangka Belitung	2023	0,388968	0,374058	0,055535	1,227357	74,09
Provinsi Gorontalo	2023	0,273397	0,520075	0,06641	1,015012	71,25
Provinsi Kepulauan Riau	2023	0,433322	0,271264	0,074416	1,025644	79,08
Provinsi Papua Barat	2023	0,133828	0,295503	0,014493	1,224159	67,47

Provinsi Sulawesi Barat	2023	0,229723	0,498043	0,107515	1,005818	69,8
Provinsi Kalimantan Utara	2023	0,317092	0,361389	0,025763	1,048949	72,88

Lampiran 2. Perhitungan TKD

Daerah	Tahun	PAD	Pendapatan	TKD
Provinsi Aceh	2019	2.698.912.471.144	15.752.800.901.652	0,171329054
Provinsi Sumatera Utara	2019	5.761.270.412.051	13.079.598.635.469	0,440477615
Provinsi Sumatera Barat	2019	2.328.432.873.686	6.390.337.204.584	0,364367763
Provinsi Riau	2019	3.558.210.585.340	8.703.232.610.160	0,408837813
Provinsi Jambi	2019	1.651.089.944.335	4.575.192.849.736	0,360878765
Provinsi Sumatera Selatan	2019	3.494.510.853.252	9.280.742.072.449	0,37653356
Provinsi Bengkulu	2019	826.674.936.050	2.934.057.941.394	0,281751401
Provinsi Lampung	2019	3.018.067.291.160	7.266.993.438.828	0,415311685
Provinsi DKI Jakarta	2019	45.707.400.003.803	62.300.679.833.068	0,733658126
Provinsi Jawa Barat	2019	21.244.266.598.018	36.037.894.762.461	0,589497992
Provinsi Jawa Tengah	2019	14.437.914.236.398	25.859.780.137.936	0,558315429
Provinsi DI Yogyakarta	2019	2.082.795.334.435	5.699.357.232.441	0,3654439
Provinsi Jawa Timur	2019	19.327.125.485.406	33.455.209.327.987	0,577701526
Provinsi Kalimantan Barat	2019	2.301.306.937.992	5.939.753.156.804	0,387441511
Provinsi	2019			0,355944365

Kalimantan Tengah		1.776.231.952.740	4.990.195.455.015	
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	349.836.748.488	6.756.797.304.944	0,051775528
Provinsi Kalimantan Timur	2019	6.555.852.805.408	11.775.086.446.200	0,556756236
Provinsi Sulawesi Utara	2019	1.286.069.364.576	3.940.225.396.821	0,326394872
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	1.090.854.785.058	4.128.153.120.870	0,264247656
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	4.138.631.215.915	9.573.910.861.961	0,432282196
Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	1.128.441.587.992	4.166.543.383.146	0,270833995
Provinsi Bali	2019	4.023.156.314.135	6.645.538.871.170	0,605392037
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	1.807.482.745.855	5.197.727.488.242	0,347744808
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	1.258.958.953.288	5.354.092.405.679	0,235139564
Provinsi Maluku	2019	482.805.590.256	3.108.914.880.044	0,15529714
Provinsi Papua	2019	2.027.638.465.327	15.239.936.933.219	0,133047694
Provinsi Maluku utara	2019	433.448.363.470	2.688.174.140.827	0,161242665
Provinsi Banten	2019	7.022.309.916.624	11.201.873.129.054	0,626887114
Provinsi Bangka Belitung	2019	826.701.095.332	2.694.205.659.655	0,306844094
Provinsi Gorontalo	2019	433.427.781.399	1.941.076.769.546	0,223292447
Provinsi Kepulauan Riau	2019	1.311.704.305.173	3.939.451.004.378	0,33296627
Provinsi Papua Barat	2019	483.725.598.745	11.339.763.889.679	0,042657467
Provinsi Sulawesi Barat	2019	337.236.194.692	2.043.393.479.200	0,165037325
Provinsi Kalimantan Utara	2019	655.846.206.223	2.610.072.420.324	0,251275099
Provinsi Aceh	2020	2.570.775.877.183	14.439.920.557.021	0,17803255
Provinsi Sumatera Utara	2020	5.531.237.378.775	12.916.359.750.491	0,428235005
Provinsi Sumatera Barat	2020	2.255.072.985.427	6.364.065.756.244	0,354344702

Provinsi Riau	2020	3.333.176.032.498	8.622.824.848.907	0,386552677
Provinsi Jambi	2020	1.535.183.487.238	4.400.624.372.119	0,348855834
Provinsi Sumatera Selatan	2020	3.375.100.984.842	9.278.520.060.062	0,363754237
Provinsi Bengkulu	2020	712.345.548.602	2.786.928.036.208	0,255602419
Provinsi Lampung	2020	2.842.286.479.070	7.019.319.471.883	0,404923368
Provinsi DKI Jakarta	2020	37.414.754.711.193	55.887.004.237.727	0,669471467
Provinsi Jawa Barat	2020	18.521.882.178.042	34.504.275.705.318	0,536799623
Provinsi Jawa Tengah	2020	13.668.282.278.855	25.393.735.934.148	0,538254092
Provinsi DI Yogyakarta	2020	1.876.706.829.355	5.611.510.924.300	0,334438773
Provinsi Jawa Timur	2020	17.950.996.508.801	31.631.024.771.618	0,567512328
Provinsi Kalimantan Barat	2020	2.154.145.653.807	5.665.113.367.861	0,380247581
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	1.570.137.570.176	4.767.014.514.749	0,329375454
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	2.940.404.641.480	6.487.758.292.203	0,453223519
Provinsi Kalimantan Timur	2020	5.289.232.781.585	10.133.115.629.662	0,521974975
Provinsi Sulawesi Utara	2020	1.125.317.788.016	3.690.999.513.208	0,304881587
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	1.054.606.448.582	4.106.116.585.245	0,256837921
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	3.890.209.264.434	9.365.471.515.326	0,415377833
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	1.017.138.016.007	4.012.335.036.317	0,253502763
Provinsi Bali	2020	3.069.474.217.923	5.718.339.699.615	0,536777173
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	1.815.690.092.106	5.174.293.221.665	0,350905914
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	1.166.570.596.936	5.419.935.156.637	0,215237003
Provinsi Maluku	2020	545.752.866.622	3.045.825.245.458	0,179180624
Provinsi Papua	2020			0,106555585

		1.388.510.064.436	13.030.852.042.529	
Provinsi Maluku utara	2020	447.291.483.047	2.581.177.165.428	0,173289726
Provinsi Banten	2020	5.906.535.160.352	10.334.116.251.227	0,571556872
Provinsi Bangka Belitung	2020	683.432.674.810	2.405.260.307.098	0,284140836
Provinsi Gorontalo	2020	414.861.588.272	1.862.646.444.966	0,222726964
Provinsi Kepulauan Riau	2020	1.165.900.404.290	35.143.100.183.325	0,033175798
Provinsi Papua Barat	2020	485.365.553.261	8.519.361.863.192	0,056972055
Provinsi Sulawesi Barat	2020	346.864.756.506	2.005.530.335.280	0,172954131
Provinsi Kalimantan Utara	2020	557.646.133.462	2.435.451.724.804	0,228970309
Provinsi Aceh	2021	2.505.887.909.031	13.948.388.273.436	0,179654298
Provinsi Sumatera Utara	2021	6.402.714.086.507	14.034.036.626.479	0,456227546
Provinsi Sumatera Barat	2021	2.551.899.163.310	6.706.053.462.905	0,380536657
Provinsi Riau	2021	4.050.468.561.143	9.383.001.507.905	0,431681542
Provinsi Jambi	2021	1.843.431.186.553	4.725.724.403.283	0,390084362
Provinsi Sumatera Selatan	2021	3.865.463.033.085	9.611.291.244.667	0,402179367
Provinsi Bengkulu	2021	984.420.164.400	3.051.751.862.803	0,322575428
Provinsi Lampung	2021	3.249.669.847.265	7.469.469.346.029	0,435060337
Provinsi DKI Jakarta	2021	41.606.307.405.630	65.567.009.199.000	0,634561617
Provinsi Jawa Barat	2021	20.333.679.966.126	36.991.873.224.931	0,549679651
Provinsi Jawa Tengah	2021	14.695.474.898.162	26.633.000.085.963	0,551776925
Provinsi DI Yogyakarta	2021	1.900.923.074.881	5.703.100.309.342	0,333313982
Provinsi Jawa Timur	2021	18.935.885.925.146	34.280.709.120.324	0,552377311
Provinsi Kalimantan Barat	2021	2.507.322.119.826	6.431.288.413.189	0,389863113

Provinsi Kalimantan Tengah	2021	1.851.575.071.029	5.199.634.633.667	0,356097149
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	356.914.942.945	6.623.086.492.762	0,053889519
Provinsi Kalimantan Timur	2021	6.111.918.272.284	10.220.142.967.274	0,59802669
Provinsi Sulawesi Utara	2021	1.310.528.740.581	3.958.016.296.497	0,331107465
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	1.494.246.273.499	4.695.680.785.592	0,318217175
Provinsi Sulawesi Selatan	2021	4.469.113.381.188	10.009.403.475.558	0,446491481
Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	1.373.793.724.629	4.529.251.153.805	0,303315863
Provinsi Bali	2021	3.117.070.012.474	5.923.153.297.395	0,526251788
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	188.456.286.096	5.326.932.790.704	0,035378011
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	1.238.032.648.889	5.312.446.872.609	0,23304377
Provinsi Maluku	2021	550.808.914.756	3.268.117.195.170	0,168540135
Provinsi Papua	2021	2.139.689.476.134	13.885.923.486.851	0,154090542
Provinsi Maluku utara	2021	552.347.164.463	2.876.947.984.752	0,191990668
Provinsi Banten	2021	7.010.370.228.687	11.623.305.653.595	0,603130507
Provinsi Bangka Belitung	2021	895.763.128.991	2.708.948.673.048	0,330668181
Provinsi Gorontalo	2021	510.804.052.687	1.972.986.602.792	0,258898896
Provinsi Kepulauan Riau	2021	1.375.770.280.701	3.809.875.862.443	0,361106327
Provinsi Papua Barat	2021	483.953.895.413	7.327.020.310.449	0,066050574
Provinsi Sulawesi Barat	2021	407.996.514.741	2.024.671.075.786	0,201512492
Provinsi Kalimantan Utara	2021	677.803.723.305	2.609.501.844.014	0,259744489
Provinsi Aceh	2022	2.917.145.003.052	13.713.584.703.596	0,212719363
Provinsi Sumatera Utara	2022	7.258.018.251.933	12.594.412.688.862	0,576288743
Provinsi Sumatera	2022			0,46524555

Barat		2.851.966.014.893	6.130.023.203.348	
Provinsi Riau	2022	4.696.769.079.910	8.818.669.764.115	0,532593827
Provinsi Jambi	2022	2.163.585.918.787	4.705.588.357.947	0,459790733
Provinsi Sumatera Selatan	2022	4.930.954.855.678	10.036.955.961.133	0,491279913
Provinsi Bengkulu	2022	1.088.415.649.978	2.953.744.560.516	0,368486722
Provinsi Lampung	2022	3.678.302.294.581	6.836.946.972.194	0,538003631
Provinsi DKI Jakarta	2022	45.608.404.729.501	67.290.479.172.308	0,67778392
Provinsi Jawa Barat	2022	23.249.622.253.957	33.236.110.512.395	0,699528973
Provinsi Jawa Tengah	2022	16.264.618.853.852	24.167.935.634.127	0,672983374
Provinsi DI Yogyakarta	2022	2.263.431.316.670	5.531.194.851.402	0,409212002
Provinsi Jawa Timur	2022	21.256.651.207.716	31.904.776.417.444	0,666252944
Provinsi Kalimantan Barat	2022	3.217.812.121.331	6.103.471.493.098	0,52721015
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	2.523.597.744.204	5.466.828.340.418	0,461620082
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	4.558.042.727.438	8.155.596.924.194	0,558885238
Provinsi Kalimantan Timur	2022	7.073.973.609.315	16.804.693.779.013	0,420952247
Provinsi Sulawesi Utara	2022	1.464.716.968.806	3.726.578.804.936	0,39304602
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	1.559.706.290.296	4.895.740.491.702	0,318584348
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	4.865.959.663.141	8.992.799.689.251	0,54109508
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	1.419.667.152.161	4.497.953.162.940	0,315625152
Provinsi Bali	2022	3.863.191.406.848	5.885.778.601.466	0,6563603
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	2.292.065.852.875	5.302.613.771.986	0,432252084
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	1.363.737.981.851	4.426.473.562.255	0,308086779
Provinsi Maluku	2022	637.948.959.231	2.915.515.472.448	0,218811721

Provinsi Papua	2022	2.226.754.654.927	11.040.109.011.239	0,2016968
Provinsi Maluku utara	2022	779.231.797.126	3.088.705.718.663	0,252284247
Provinsi Banten	2022	8.203.139.526.542	11.205.654.716.542	0,732053569
Provinsi Bangka Belitung	2022	1.090.477.839.965	2.881.466.811.892	0,378445393
Provinsi Gorontalo	2022	510.337.164.774	1.848.593.656.988	0,27606779
Provinsi Kepulauan Riau	2022	1.675.729.889.080	3.918.136.426.614	0,427685437
Provinsi Papua Barat	2022	620.304.274.756	7.764.412.862.006	0,079890687
Provinsi Sulawesi Barat	2022	457.963.285.700	1.894.618.795.334	0,241717905
Provinsi Kalimantan Utara	2022	815.664.188.997	2.731.491.817.452	0,298614912
Provinsi Aceh	2023	2.987.188.692.204	10.572.492.903.656	0,282543457
Provinsi Sumatera Utara	2023	7.225.688.105.703	12.757.833.199.493	0,566372674
Provinsi Sumatera Barat	2023	2.784.774.801.213	6.263.878.436.852	0,444576763
Provinsi Riau	2023	5.891.605.742.972	10.009.979.591.478	0,588573202
Provinsi Jambi	2023	1.794.998.996.335	4.622.674.042.285	0,388303173
Provinsi Sumatera Selatan	2023	5.199.841.748.586	9.871.340.904.349	0,52676144
Provinsi Bengkulu	2023	1.033.849.518.692	2.991.013.990.544	0,34565185
Provinsi Lampung	2023	3.766.194.060.533	6.987.319.981.739	0,539004092
Provinsi DKI Jakarta	2023	49.139.745.715.234	71.065.534.207.722	0,691470855
Provinsi Jawa Barat	2023	24.375.389.630.532	34.772.844.052.840	0,700989243
Provinsi Jawa Tengah	2023	17.012.509.421.006	25.369.733.556.675	0,670582897
Provinsi DI Yogyakarta	2023	2.368.679.166.254	5.840.561.001.093	0,405556789
Provinsi Jawa Timur	2023	22.317.204.435.685	33.767.866.236.628	0,660900641
Provinsi	2023			0,511931398

Kalimantan Barat		3.222.528.989.836	6.294.845.373.832	
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	2.589.901.319.397	6.730.216.813.007	0,384816922
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	4.861.658.909.889	9.877.771.018.512	0,492181779
Provinsi Kalimantan Timur	2023	10.334.805.509.404	17.750.987.305.165	0,58221018
Provinsi Sulawesi Utara	2023	1.460.744.817.777	3.538.185.274.966	0,412851421
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	1.714.725.360.540	4.543.640.253.934	0,377390212
Provinsi Sulawesi Selatan	2023	5.183.909.557.071	9.529.048.625.671	0,54401124
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	1.619.936.693.725	4.610.446.114.004	0,351362244
Provinsi Bali	2023	4.627.741.217.667	6.774.061.484.297	0,683156069
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	2.790.069.455.407	5.798.011.398.325	0,481211447
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	1.427.035.167.291	4.624.897.387.195	0,30855499
Provinsi Maluku	2023	664.661.915.577	3.068.566.443.640	0,216603397
Provinsi Papua	2023	770.916.168.972	3.733.670.617.987	0,206476748
Provinsi Maluku utara	2023	804.961.566.392	3.138.212.391.117	0,256503215
Provinsi Banten	2023	8.514.348.394.263	11.576.544.862.694	0,735482693
Provinsi Bangka Belitung	2023	1.012.603.272.005	2.603.309.223.149	0,388967727
Provinsi Gorontalo	2023	511.931.921.681	1.872.487.105.529	0,273396767
Provinsi Kepulauan Riau	2023	1.806.972.833.505	4.170.044.095.409	0,433322236
Provinsi Papua Barat	2023	570.268.533.821	4.261.210.554.291	0,133827823
Provinsi Sulawesi Barat	2023	464.118.294.990	2.020.337.607.783	0,229723138
Provinsi Kalimantan Utara	2023	980.136.675.968	3.091.012.760.999	0,317092407

Lampiran 3. Perhitungan Dana Transfer

Daerah	Tahun	DAU	Pendapatan	Dana Tranfer
Provinsi Aceh	2019	2.322.266.506.000	15.752.800.901.652	0,147419276
Provinsi Sumatera Utara	2019	2.713.750.553.000	13.079.598.635.469	0,20747965
Provinsi Sumatera Barat	2019	2.076.398.191.000	6.390.337.204.584	0,324927797
Provinsi Riau	2019	1.548.578.928.000	8.703.232.610.160	0,177931465
Provinsi Jambi	2019	1.433.203.410.000	4.575.192.849.736	0,3132553
Provinsi Sumatera Selatan	2019	1.743.742.960.000	9.280.742.072.449	0,187888312
Provinsi Bengkulu	2019	1.334.178.390.000	2.934.057.941.394	0,454721214
Provinsi Lampung	2019	1.906.780.297.000	7.266.993.438.828	0,262389159
Provinsi DKI Jakarta	2019	-	62.300.679.833.068	0
Provinsi Jawa Barat	2019	3.212.647.404.000	36.037.894.762.461	0,089146367
Provinsi Jawa Tengah	2019	3.784.512.513.000	25.859.780.137.936	0,146347436
Provinsi DI Yogyakarta	2019	1.351.102.020.000	5.699.357.232.441	0,237062175
Provinsi Jawa Timur	2019	25.939.668.270.716	33.455.209.327.987	0,775355133
Provinsi Kalimantan Barat	2019	1.756.069.684.000	5.939.753.156.804	0,295646913
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	1.603.623.745.000	4.990.195.455.015	0,321354897
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	1.188.146.871.000	6.756.797.304.944	0,175844682
Provinsi Kalimantan Timur	2019	815.693.641.000	11.775.086.446.200	0,069272837

Provinsi Sulawesi Utara	2019	1.463.436.158.000	3.940.225.396.821	0,37140925
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	1.637.588.970.000	4.128.153.120.870	0,39668804
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	2.586.312.342.000	9.573.910.861.961	0,270141678
Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	1.614.486.358.000	4.166.543.383.146	0,387488191
Provinsi Bali	2019	1.325.847.555.000	6.645.538.871.170	0,199509412
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	1.583.746.053.000	5.197.727.488.242	0,304699709
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	1.875.182.301.000	5.354.092.405.679	0,350233459
Provinsi Maluku	2019	1.699.714.805.000	3.108.914.880.044	0,54672285
Provinsi Papua	2019	2.616.545.381.000	15.239.936.933.219	0,17169004
Provinsi Maluku utara	2019	1.349.662.180.000	2.688.174.140.827	0,502073939
Provinsi Banten	2019	1.140.003.353.000	11.201.873.129.054	0,101768993
Provinsi Bangka Belitung	2019	1.046.862.622.000	2.694.205.659.655	0,388560769
Provinsi Gorontalo	2019	1.043.126.752.000	1.941.076.769.546	0,537395928
Provinsi Kepulauan Riau	2019	1.190.057.596.000	3.939.451.004.378	0,302087168
Provinsi Papua Barat	2019	1.456.520.204.000	11.339.763.889.679	0,128443609
Provinsi Sulawesi Barat	2019	1.064.068.728.000	2.043.393.479.200	0,520736089
Provinsi Kalimantan Utara	2019	1.209.517.808.000	2.610.072.420.324	0,463403926
Provinsi Aceh	2020	1.956.492.796.000	14.439.920.557.021	0,135491936
Provinsi Sumatera Utara	2020	2.474.465.343.000	12.916.359.750.491	0,191576063
Provinsi Sumatera Barat	2020	1.891.323.979.000	6.364.065.756.244	0,297188001
Provinsi Riau	2020	1.432.349.278.000	8.622.824.848.907	0,166111373
Provinsi Jambi	2020	1.288.418.327.000	4.400.624.372.119	0,292780801
Provinsi Sumatera Selatan	2020			0,017093525

		158.602.615.000	9.278.520.060.062	
Provinsi Bengkulu	2020	1.219.949.535.000	2.786.928.036.208	0,437739877
Provinsi Lampung	2020	1.732.551.921.000	7.019.319.471.883	0,246826196
Provinsi DKI Jakarta	2020	-	55.887.004.237.727	0
Provinsi Jawa Barat	2020	2.964.612.155.000	34.504.275.705.318	0,085920139
Provinsi Jawa Tengah	2020	3.438.709.973.000	25.393.735.934.148	0,135415678
Provinsi DI Yogyakarta	2020	1.227.647.676.000	5.611.510.924.300	0,218773106
Provinsi Jawa Timur	2020	3.662.910.027.000	31.631.024.771.618	0,115801181
Provinsi Kalimantan Barat	2020	1.563.770.887.000	5.665.113.367.861	0,276035233
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	1.439.305.729.000	4.767.014.514.749	0,301930217
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	1.091.037.011.000	6.487.758.292.203	0,168168566
Provinsi Kalimantan Timur	2020	831.404.756.000	10.133.115.629.662	0,082048285
Provinsi Sulawesi Utara	2020	1.335.813.209.000	3.690.999.513.208	0,361910969
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	1.488.847.818.000	4.106.116.585.245	0,36259268
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	2.349.993.034.000	9.365.471.515.326	0,250920953
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	1.454.628.700.000	4.012.335.036.317	0,362539191
Provinsi Bali	2020	1.204.700.789.000	5.718.339.699.615	0,210673177
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	1.475.540.106.000	5.174.293.221.665	0,28516747
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	1.716.206.146.000	5.419.935.156.637	0,316646989
Provinsi Maluku	2020	1.524.466.221.000	3.045.825.245.458	0,500510075
Provinsi Papua	2020	233.002.000.300	13.030.852.042.529	0,017880795
Provinsi Maluku utara	2020	1.221.012.415.000	2.581.177.165.428	0,473044792
Provinsi Banten	2020	1.042.968.771.000	10.334.116.251.227	0,100924815

Provinsi Bangka Belitung	2020	942.308.451.000	2.405.260.307.098	0,391769842
Provinsi Gorontalo	2020	944.270.446.000	1.862.646.444.966	0,506950983
Provinsi Kepulauan Riau	2020	1.099.291.405.000	35.143.100.183.325	0,031280433
Provinsi Papua Barat	2020	1.299.870.490.000	8.519.361.863.192	0,152578387
Provinsi Sulawesi Barat	2020	968.832.936.546	2.005.530.335.280	0,483080669
Provinsi Kalimantan Utara	2020	1.082.389.409.000	2.435.451.724.804	0,444430657
Provinsi Aceh	2021	1.945.980.616.000	13.948.388.273.436	0,139512937
Provinsi Sumatera Utara	2021	2.463.686.589.000	14.034.036.626.479	0,175550817
Provinsi Sumatera Barat	2021	1.887.033.911.000	6.706.053.462.905	0,281392614
Provinsi Riau	2021	1.455.383.959.000	9.383.001.507.905	0,155108571
Provinsi Jambi	2021	1.284.884.150.000	4.725.724.403.283	0,271891469
Provinsi Sumatera Selatan	2021	1.563.041.287.000	9.611.291.244.667	0,162625525
Provinsi Bengkulu	2021	1.213.764.868.000	3.051.751.862.803	0,397727247
Provinsi Lampung	2021	1.726.296.248.000	7.469.469.346.029	0,23111364
Provinsi DKI Jakarta	2021	-	65.567.009.199.000	0
Provinsi Jawa Barat	2021	3.007.928.119.000	36.991.873.224.931	0,081313214
Provinsi Jawa Tengah	2021	3.432.978.859.000	26.633.000.085.963	0,128899442
Provinsi DI Yogyakarta	2021	1.224.852.487.000	5.703.100.309.342	0,214769585
Provinsi Jawa Timur	2021	3.650.366.754.000	34.280.709.120.324	0,106484575
Provinsi Kalimantan Barat	2021	1.572.247.838.000	6.431.288.413.189	0,244468563
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	1.431.363.200.000	5.199.634.633.667	0,275281496
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	1.093.343.743.000	6.623.086.492.762	0,165080698
Provinsi Kalimantan	2021			0,081021389

Timur		828.050.174.361	10.220.142.967.274	
Provinsi Sulawesi Utara	2021	1.330.463.660.000	3.958.016.296.497	0,336144058
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	1.493.138.739.000	4.695.680.785.592	0,317981312
Provinsi Sulawesi Selatan	2021	2.339.135.873.000	10.009.403.475.558	0,233693834
Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	1.456.620.465.000	4.529.251.153.805	0,321602935
Provinsi Bali	2021	1.201.511.839.000	5.923.153.297.395	0,202850033
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	1.475.675.853.000	5.326.932.790.704	0,277021677
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	1.726.712.089.000	5.312.446.872.609	0,325031408
Provinsi Maluku	2021	1.523.748.760.870	3.268.117.195.170	0,46624667
Provinsi Papua	2021	2.314.920.067.000	13.885.923.486.851	0,166709839
Provinsi Maluku utara	2021	1.222.526.964.000	2.876.947.984.752	0,424938849
Provinsi Banten	2021	1.070.448.323.000	11.623.305.653.595	0,092094999
Provinsi Bangka Belitung	2021	939.550.039.000	2.708.948.673.048	0,346831983
Provinsi Gorontalo	2021	940.639.321.000	1.972.986.602.792	0,476759102
Provinsi Kepulauan Riau	2021	1.092.929.539.000	3.809.875.862.443	0,286867493
Provinsi Papua Barat	2021	1.307.710.344.000	7.327.020.310.449	0,178477783
Provinsi Sulawesi Barat	2021	970.916.874.000	2.024.671.075.786	0,479543016
Provinsi Kalimantan Utara	2021	1.077.878.230.685	2.609.501.844.014	0,413059003
Provinsi Aceh	2022	1.941.752.249.876	13.713.584.703.596	0,141593339
Provinsi Sumatera Utara	2022	2.432.954.103.819	12.594.412.688.862	0,193177258
Provinsi Sumatera Barat	2022	1.877.994.607.585	6.130.023.203.348	0,306360114
Provinsi Riau	2022	1.452.245.879.000	8.818.669.764.115	0,164678565
Provinsi Jambi	2022	1.280.747.230.001	4.705.588.357.947	0,27217579

Provinsi Sumatera Selatan	2022	1.563.041.287.000	10.036.955.961.133	0,155728619
Provinsi Bengkulu	2022	1.210.018.708.471	2.953.744.560.516	0,40965584
Provinsi Lampung	2022	1.719.175.460.727	6.836.946.972.194	0,251453678
Provinsi DKI Jakarta	2022	-	67.290.479.172.308	0
Provinsi Jawa Barat	2022	2.981.692.750.817	33.236.110.512.395	0,089712445
Provinsi Jawa Tengah	2022	3.435.718.090.405	24.167.935.634.127	0,14216018
Provinsi DI Yogyakarta	2022	1.218.923.700.185	5.531.194.851.402	0,220372584
Provinsi Jawa Timur	2022	3.596.920.054.085	31.904.776.417.444	0,112739234
Provinsi Kalimantan Barat	2022	1.553.304.284.810	6.103.471.493.098	0,254495214
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	1.422.689.360.003	5.466.828.340.418	0,260240357
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	1.088.330.794.738	8.155.596.924.194	0,133445878
Provinsi Kalimantan Timur	2022	824.108.986.889	16.804.693.779.013	0,049040405
Provinsi Sulawesi Utara	2022	1.220.915.150.329	3.726.578.804.936	0,327623596
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	1.488.995.344.513	4.895.740.491.702	0,304140987
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	2.340.040.525.000	8.992.799.689.251	0,260212682
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	1.452.553.358.151	4.497.953.162.940	0,322936524
Provinsi Bali	2022	1.194.632.100.845	5.885.778.601.466	0,202969256
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	1.475.280.205.081	5.302.613.771.986	0,278217549
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	1.730.933.330.000	4.426.473.562.255	0,391041154
Provinsi Maluku	2022	1.520.592.102.245	2.915.515.472.448	0,521551718
Provinsi Papua	2022	2.314.920.067.000	11.040.109.011.239	0,209682718
Provinsi Maluku utara	2022	1.220.879.144.286	3.088.705.718.663	0,395272083
Provinsi Banten	2022			0,095495434

		1.070.088.859.986	11.205.654.716.542	
Provinsi Bangka Belitung	2022	940.826.194.035	2.881.466.811.892	0,326509467
Provinsi Gorontalo	2022	940.903.029.000	1.848.593.656.988	0,508983153
Provinsi Kepulauan Riau	2022	1.092.495.588.916	3.918.136.426.614	0,278830411
Provinsi Papua Barat	2022	1.306.637.220.000	7.764.412.862.006	0,168285387
Provinsi Sulawesi Barat	2022	969.853.896.329	1.894.618.795.334	0,511899227
Provinsi Kalimantan Utara	2022	1.080.588.578.315	2.731.491.817.452	0,395603813
Provinsi Aceh	2023	2.015.956.282.000	10.572.492.903.656	0,19067937
Provinsi Sumatera Utara	2023	2.682.814.024.612	12.757.833.199.493	0,210287592
Provinsi Sumatera Barat	2023	1.989.337.430.162	6.263.878.436.852	0,317588767
Provinsi Riau	2023	1.506.286.541.167	10.009.979.591.478	0,150478483
Provinsi Jambi	2023	1.320.355.014.848	4.622.674.042.285	0,285625809
Provinsi Sumatera Selatan	2023	1.625.443.414.000	9.871.340.904.349	0,164662879
Provinsi Bengkulu	2023	1.256.246.638.000	2.991.013.990.544	0,420006941
Provinsi Lampung	2023	1.801.103.297.000	6.987.319.981.739	0,257767399
Provinsi DKI Jakarta	2023	22.179.718.000	71.065.534.207.722	0,000312102
Provinsi Jawa Barat	2023	3.298.968.208.000	34.772.844.052.840	0,09487197
Provinsi Jawa Tengah	2023	3.558.429.343.000	25.369.733.556.675	0,140262779
Provinsi DI Yogyakarta	2023	1.267.772.324.000	5.840.561.001.093	0,217063451
Provinsi Jawa Timur	2023	3.797.585.034.000	33.767.866.236.628	0,112461504
Provinsi Kalimantan Barat	2023	1.683.744.265.000	6.294.845.373.832	0,267479845
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	1.481.460.912.000	6.730.216.813.007	0,22012083
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	1.131.610.774.000	9.877.771.018.512	0,114561349

Provinsi Kalimantan Timur	2023	857.919.020.000	17.750.987.305.165	0,048330778
Provinsi Sulawesi Utara	2023	1.377.029.888.000	3.538.185.274.966	0,389191006
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	1.547.264.182.000	4.543.640.253.934	0,340534042
Provinsi Sulawesi Selatan	2023	2.525.244.049.000	9.529.048.625.671	0,265004844
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	1.507.602.181.000	4.610.446.114.004	0,326997029
Provinsi Bali	2023	1.243.564.753.000	6.774.061.484.297	0,183577423
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	1.600.492.624.000	5.798.011.398.325	0,276041648
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	1.857.019.095.000	4.624.897.387.195	0,401526551
Provinsi Maluku	2023	1.578.790.923.000	3.068.566.443.640	0,514504395
Provinsi Papua	2023	824.236.308.000	3.733.670.617.987	0,220757638
Provinsi Maluku utara	2023	1.266.274.528.000	3.138.212.391.117	0,403501857
Provinsi Banten	2023	1.108.754.376.000	11.576.544.862.694	0,095775932
Provinsi Bangka Belitung	2023	973.788.835.000	2.603.309.223.149	0,374058074
Provinsi Gorontalo	2023	973.834.635.000	1.872.487.105.529	0,520075483
Provinsi Kepulauan Riau	2023	1.131.182.073.000	4.170.044.095.409	0,271263816
Provinsi Papua Barat	2023	1.259.198.372.000	4.261.210.554.291	0,2955025
Provinsi Sulawesi Barat	2023	1.006.215.801.000	2.020.337.607.783	0,498043395
Provinsi Kalimantan Utara	2023	1.117.056.623.000	3.091.012.760.999	0,361388551

Lampiran 4. Perhitungan *Leverage*

Daerah	Tahun	Utang	Ekuitas	<i>Leverage</i>
Provinsi Aceh	2019	2.745.018.328.614	25.709.483.208.841	0,106770654
Provinsi Sumatera Utara	2019	481.658.220.742	18.134.943.216.807	0,026559676
Provinsi Sumatera Barat	2019	289.469.831.446	10.606.623.840.786	0,027291421
Provinsi Riau	2019	327.301.573.207	32.734.736.335.269	0,009998601
Provinsi Jambi	2019	411.030.632.726	8.530.688.465.049	0,048182586
Provinsi Sumatera Selatan	2019	305.072.146.592	25.566.960.490.904	0,011932281
Provinsi Bengkulu	2019	433.283.769.353	5.627.267.690.493	0,076997185
Provinsi Lampung	2019	1.102.785.690.547	8.614.266.390.720	0,128018527
Provinsi DKI Jakarta	2019	10.582.694.275.107	506.572.395.414.381	0,020890784
Provinsi Jawa Barat	2019	445.502.245.419	40.278.938.466.319	0,011060427
Provinsi Jawa Tengah	2019	399.197.714.864	37.100.999.040.516	0,010759756
Provinsi DI Yogyakarta	2019	41.219.264.668	10.343.362.322.871	0,003985093
Provinsi Jawa Timur	2019	837.245.314.941	40.782.175.168.974	0,020529688
Provinsi Kalimantan Barat	2019	245.881.765.726	11.889.256.256.540	0,020681005
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	284.604.817.752	11.413.340.755.426	0,024936154
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	1.463.128.807.084	17.076.791.067.857	0,085679376
Provinsi Kalimantan Timur	2019	1.997.838.824.220	31.875.220.777.035	0,062676862
Provinsi Sulawesi Utara	2019	241.388.260.341	8.984.476.942.726	0,026867258
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	102.430.254.139	6.012.626.098.544	0,01703586
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	488.641.243.032	17.381.912.823.212	0,028112052

Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	440.643.713.846	10.367.990.759.728	0,042500396
Provinsi Bali	2019	168.312.600.949	10.712.424.739.809	0,015711905
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	55.522.968.543	12.611.315.712.756	0,004402631
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	56.929.422.509	9.091.417.465.318	0,006261886
Provinsi Maluku	2019	196.316.949.580	4.992.466.387.753	0,039322638
Provinsi Papua	2019	252.405.058.446	24.323.796.710.513	0,010376877
Provinsi Maluku utara	2019	106.405.844.953	4.738.096.627.881	0,022457508
Provinsi Banten	2019	257.524.377.063	16.599.186.312.519	0,015514277
Provinsi Bangka Belitung	2019	144.298.700.381	4.312.378.114.996	0,033461514
Provinsi Gorontalo	2019	71.379.600.571	2.255.220.023.488	0,031650837
Provinsi Kepulauan Riau	2019	417.140.756.100	6.038.284.552.998	0,06908266
Provinsi Papua Barat	2019	334.520.928.705	15.348.715.397.178	0,021794718
Provinsi Sulawesi Barat	2019	184.723.900.691	2.728.198.134.867	0,067709122
Provinsi Kalimantan Utara	2019	433.244.097.794	6.745.370.486.884	0,064228362
Provinsi Aceh	2020	3.037.487.998.856	27.256.349.028.467	0,111441485
Provinsi Sumatera Utara	2020	1.563.986.566.797	16.130.504.414.782	0,096958317
Provinsi Sumatera Barat	2020	382.136.934.823	10.279.005.414.073	0,03717645
Provinsi Riau	2020	234.272.884.343	32.811.787.287.704	0,0071399
Provinsi Jambi	2020	389.279.172.270	8.669.519.067.524	0,044902049
Provinsi Sumatera Selatan	2020	852.701.096.597	31.142.490.750.017	0,027380633
Provinsi Bengkulu	2020	418.341.140.836	5.827.035.251.154	0,071793137
Provinsi Lampung	2020	873.388.365.230	10.358.609.340.088	0,084315214
Provinsi DKI Jakarta	2020			0,029901237

		15.107.695.822.217	505.253.204.084.055	
Provinsi Jawa Barat	2020	2.020.246.834.989	36.589.431.907.709	0,055213944
Provinsi Jawa Tengah	2020	824.663.799.218	36.397.640.492.435	0,022657068
Provinsi DI Yogyakarta	2020	44.849.799.129	11.290.686.277.272	0,003972283
Provinsi Jawa Timur	2020	786.498.445.704	41.144.375.531.015	0,019115576
Provinsi Kalimantan Barat	2020	185.353.448.442	12.341.740.766.360	0,01501842
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	317.895.513.003	10.715.920.803.774	0,029665721
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	1.542.865.787.836	16.942.617.800.523	0,091064191
Provinsi Kalimantan Timur	2020	2.422.453.007.954	32.192.737.793.292	0,075248431
Provinsi Sulawesi Utara	2020	1.235.348.757.386	8.699.863.246.424	0,141996342
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	118.013.807.796	6.390.574.800.088	0,018466853
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	1.928.633.014.828	17.708.109.611.389	0,108912417
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	633.698.873.803	10.885.441.354.529	0,058215267
Provinsi Bali	2020	160.015.626.311	10.355.546.348.165	0,015452166
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	280.780.319.502	12.569.968.659.801	0,022337392
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	228.479.309.224	9.552.250.935.718	0,023918897
Provinsi Maluku	2020	294.698.355.838	5.505.040.254.218	0,053532462
Provinsi Papua	2020	257.903.126.980	24.362.193.927.168	0,010586203
Provinsi Maluku utara	2020	224.585.616.616	5.046.063.234.852	0,044507095
Provinsi Banten	2020	2.008.280.875.331	16.370.976.780.669	0,122673247
Provinsi Bangka Belitung	2020	118.818.903.637	4.465.483.911.765	0,026608293
Provinsi Gorontalo	2020	78.673.658.937	2.366.918.454.867	0,033238855
Provinsi Kepulauan Riau	2020	459.425.971.449	6.032.925.564.877	0,076153098

Provinsi Papua Barat	2020	669.235.465.573	15.615.107.862.819	0,042858203
Provinsi Sulawesi Barat	2020	182.391.164.368	2.793.277.281.251	0,065296477
Provinsi Kalimantan Utara	2020	429.111.039.906	6.879.602.145.160	0,062374398
Provinsi Aceh	2021	519.675.649.404	31.331.114.695.221	0,016586568
Provinsi Sumatera Utara	2021	1.527.780.579.564	17.297.235.505.837	0,08832513
Provinsi Sumatera Barat	2021	407.122.182.206	10.892.148.134.983	0,037377584
Provinsi Riau	2021	314.292.012.304	32.347.067.347.276	0,009716244
Provinsi Jambi	2021	381.763.642.325	9.148.064.697.057	0,041731629
Provinsi Sumatera Selatan	2021	1.449.569.292.272	31.858.511.529.759	0,04550022
Provinsi Bengkulu	2021	352.150.110.792	6.257.538.991.861	0,056276135
Provinsi Lampung	2021	959.973.266.316	10.877.344.221.797	0,08825438
Provinsi DKI Jakarta	2021	19.975.312.518.107	524.529.268.466.569	0,03808236
Provinsi Jawa Barat	2021	4.069.786.893.568	37.941.265.932.397	0,107265448
Provinsi Jawa Tengah	2021	383.270.068.724	38.908.675.268.489	0,009850504
Provinsi DI Yogyakarta	2021	48.687.380.761	11.950.577.596.344	0,004074061
Provinsi Jawa Timur	2021	710.737.566.790	42.916.995.847.235	0,016560748
Provinsi Kalimantan Barat	2021	137.294.394.437	13.272.338.839.433	0,010344401
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	418.775.248.552	12.394.812.071.763	0,033786333
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	1.683.473.588.690	17.209.941.279.503	0,097819833
Provinsi Kalimantan Timur	2021	1.631.635.729.557	31.895.376.447.986	0,05115587
Provinsi Sulawesi Utara	2021	1.807.652.760.878	8.774.741.428.249	0,206006385
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	165.531.604.153	6.993.667.081.081	0,023668785
Provinsi Sulawesi Selatan	2021			0,101840394

		1.931.962.201.592	18.970.490.342.935	
Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	1.365.524.267.825	11.888.888.899.512	0,114857181
Provinsi Bali	2021	1.426.567.618.059	10.517.452.914.778	0,135638127
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	685.054.098.771	12.588.259.482.702	0,054420081
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	641.414.208.027	10.233.719.426.349	0,062676548
Provinsi Maluku	2021	829.822.406.554	5.682.147.536.895	0,146040278
Provinsi Papua	2021	154.675.600.410	23.070.198.453.451	0,006704563
Provinsi Maluku utara	2021	406.646.614.739	5.345.832.010.300	0,076067975
Provinsi Banten	2021	1.681.515.246.679	17.850.601.341.654	0,094199361
Provinsi Bangka Belitung	2021	360.808.967.286	4.690.919.277.274	0,076916473
Provinsi Gorontalo	2021	70.295.293.821	2.468.671.064.731	0,028474954
Provinsi Kepulauan Riau	2021	512.851.005.479	6.129.843.804.892	0,083664612
Provinsi Papua Barat	2021	261.608.302.838	17.221.857.654.496	0,015190481
Provinsi Sulawesi Barat	2021	241.015.054.001	2.908.080.518.685	0,08287771
Provinsi Kalimantan Utara	2021	436.147.558.547	7.099.986.150.246	0,061429353
Provinsi Aceh	2022	595.981.306.944	33.505.370.933.088	0,017787635
Provinsi Sumatera Utara	2022	2.174.971.966.534	20.544.565.494.336	0,105866048
Provinsi Sumatera Barat	2022	298.700.807.561	11.527.870.140.305	0,025911188
Provinsi Riau	2022	473.293.202.094	32.457.941.451.757	0,014581738
Provinsi Jambi	2022	484.743.302.036	9.481.370.806.802	0,051125867
Provinsi Sumatera Selatan	2022	1.318.710.997.409	33.926.242.306.876	0,03886994
Provinsi Bengkulu	2022	194.175.701.938	6.532.435.793.005	0,029724854
Provinsi Lampung	2022	949.130.280.317	11.333.275.750.041	0,083747215

Provinsi DKI Jakarta	2022	19.426.434.755.048	665.549.886.851.294	0,029188548
Provinsi Jawa Barat	2022	4.009.636.872.460	416.845.766.425.979	0,009618994
Provinsi Jawa Tengah	2022	338.699.949.468	39.937.638.803.343	0,00848072
Provinsi DI Yogyakarta	2022	39.139.904.503	12.528.014.950.939	0,00312419
Provinsi Jawa Timur	2022	698.095.611.062	49.871.350.468.079	0,013997929
Provinsi Kalimantan Barat	2022	290.517.036.692	14.518.230.088.527	0,0200105
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	604.985.305.330	11.747.128.403.803	0,051500697
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	1.562.652.895.282	19.438.099.594.872	0,080391238
Provinsi Kalimantan Timur	2022	1.221.831.085.201	37.139.153.211.210	0,032898733
Provinsi Sulawesi Utara	2022	1.800.476.237.587	9.244.199.703.635	0,194768211
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	195.001.136.140	7.181.521.683.029	0,027153178
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	1.898.913.410.461	17.437.003.807.294	0,108901359
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	1.590.602.470.017	12.787.976.998.925	0,12438265
Provinsi Bali	2022	1.918.450.086.846	11.191.129.745.531	0,171425953
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	1.376.195.156.248	12.659.349.899.034	0,108709781
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	1.267.002.282.372	10.396.432.365.579	0,121868949
Provinsi Maluku	2022	860.912.955.472	5.830.383.827.754	0,147659739
Provinsi Papua	2022	149.638.006.751	23.462.462.667.754	0,006377762
Provinsi Maluku utara	2022	946.444.746.444	5.231.383.639.865	0,180916716
Provinsi Banten	2022	1.513.017.345.271	18.589.248.509.361	0,081392066
Provinsi Bangka Belitung	2022	431.450.910.768	5.300.675.345.826	0,081395461
Provinsi Gorontalo	2022	159.616.942.332	2.511.279.322.055	0,063560011
Provinsi Kepulauan Riau	2022			0,095587655

		625.518.466.827	6.543.925.196.252	
Provinsi Papua Barat	2022	242.738.087.099	17.779.837.496.892	0,013652436
Provinsi Sulawesi Barat	2022	355.349.599.079	2.987.803.037.209	0,118933408
Provinsi Kalimantan Utara	2022	256.879.686.089	7.514.931.922.018	0,03418257
Provinsi Aceh	2023	934.354.190.146	32.308.546.824.459	0,028919722
Provinsi Sumatera Utara	2023	2.819.161.340.236	21.572.962.930.030	0,130680303
Provinsi Sumatera Barat	2023	493.355.576.176	11.698.383.180.031	0,042172971
Provinsi Riau	2023	416.623.969.210	33.792.499.783.673	0,012328889
Provinsi Jambi	2023	446.631.759.640	19.340.597.398.982	0,023092966
Provinsi Sumatera Selatan	2023	1.917.955.896.459	34.039.832.496.861	0,056344458
Provinsi Bengkulu	2023	459.163.636.570	13.399.045.301.218	0,034268385
Provinsi Lampung	2023	1.534.228.727.018	11.611.669.669.919	0,132128175
Provinsi DKI Jakarta	2023	17.426.015.191.033	698.072.284.621.375	0,024963053
Provinsi Jawa Barat	2023	3.475.042.698.697	42.295.165.428.243	0,0821617
Provinsi Jawa Tengah	2023	862.661.977.588	81.006.046.414.967	0,010649353
Provinsi DI Yogyakarta	2023	34.717.835.502	13.170.046.237.337	0,002636121
Provinsi Jawa Timur	2023	608.667.978.300	51.569.883.014.863	0,01180278
Provinsi Kalimantan Barat	2023	226.056.200.830	15.813.025.108.331	0,01429557
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	313.212.657.317	14.687.232.018.091	0,021325506
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	790.775.158.689	21.189.795.269.631	0,037318679
Provinsi Kalimantan Timur	2023	890.203.828.231	42.530.227.837.211	0,020931085
Provinsi Sulawesi Utara	2023	1.498.854.248.194	9.450.707.553.106	0,15859704
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	222.116.513.523	7.821.102.776.929	0,028399641

Provinsi Sulawesi Selatan	2023	2.233.459.362.811	17.978.257.414.518	0,124231137
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	1.152.224.757.384	13.851.966.547.773	0,083181312
Provinsi Bali	2023	2.316.395.044.546	15.648.183.735.009	0,148029643
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	1.298.601.052.963	13.304.097.120.663	0,097609108
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	1.195.417.144.551	10.064.001.342.526	0,118781497
Provinsi Maluku	2023	751.449.910.819	6.131.786.731.627	0,12254991
Provinsi Papua	2023	65.316.936.191	22.193.619.744.422	0,00294305
Provinsi Maluku utara	2023	1.574.834.026.699	5.353.603.279.639	0,294163378
Provinsi Banten	2023	1.296.016.786.532	19.184.343.785.908	0,067555961
Provinsi Bangka Belitung	2023	280.498.038.848	5.050.790.927.039	0,055535468
Provinsi Gorontalo	2023	157.271.423.033	2.368.190.518.078	0,066409954
Provinsi Kepulauan Riau	2023	503.356.852.441	6.764.055.547.180	0,074416428
Provinsi Papua Barat	2023	247.146.043.527	17.052.548.148.417	0,014493203
Provinsi Sulawesi Barat	2023	334.524.121.296	3.111.404.572.664	0,107515469
Provinsi Kalimantan Utara	2023	250.633.815.155	9.728.487.304.562	0,025762876

Lampiran 5. Perhitungan KK

Daerah	Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan	KK
Provinsi Aceh	2019			0,790311611

		12.449.621.461.071	15.752.800.901.652	
Provinsi Sumatera Utara	2019	13.440.323.705.747	13.079.598.635.469	1,027579216
Provinsi Sumatera Barat	2019	6.551.278.880.635	6.390.337.204.584	1,025185162
Provinsi Riau	2019	8.690.390.951.117	8.703.232.610.160	0,998524495
Provinsi Jambi	2019	4.824.366.351.413	4.575.192.849.736	1,054461858
Provinsi Sumatera Selatan	2019	6.422.760.771.550	9.280.742.072.449	0,692052502
Provinsi Bengkulu	2019	3.118.303.518.797	2.934.057.941.394	1,06279548
Provinsi Lampung	2019	5.583.637.872.354	7.266.993.438.828	0,768355981
Provinsi DKI Jakarta	2019	64.099.287.469.013	62.300.679.833.068	1,028869791
Provinsi Jawa Barat	2019	35.833.086.126.517	36.037.894.762.461	0,994316853
Provinsi Jawa Tengah	2019	18.456.935.979.539	25.859.780.137.936	0,713731357
Provinsi DI Yogyakarta	2019	4.523.871.348.582	5.699.357.232.441	0,793751148
Provinsi Jawa Timur	2019	25.939.668.270.716	33.455.209.327.987	0,775355133
Provinsi Kalimantan Barat	2019	4.685.285.323.793	5.939.753.156.804	0,788801353
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	4.312.954.965.436	4.990.195.455.015	0,864285779
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	5.532.643.675.833	6.756.797.304.944	0,81882635
Provinsi Kalimantan Timur	2019	6.488.228.331.290	11.775.086.446.200	0,551013223
Provinsi Sulawesi Utara	2019	3.674.801.265.284	3.940.225.396.821	0,932637323
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	4.098.771.219.451	4.128.153.120.870	0,992882555
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	7.246.039.362.054	9.573.910.861.961	0,756852604
Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	3.743.684.367.363	4.166.543.383.146	0,898510833
Provinsi Bali	2019	4.403.625.560.598	6.645.538.871.170	0,662643865
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	4.375.546.682.897	5.197.727.488.242	0,841819178

Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	4.758.379.563.095	5.354.092.405.679	0,888736914
Provinsi Maluku	2019	2.759.044.049.233	3.108.914.880.044	0,887462075
Provinsi Papua	2019	10.302.640.234.203	15.239.936.933.219	0,67602906
Provinsi Maluku utara	2019	2.474.855.784.346	2.688.174.140.827	0,920645633
Provinsi Banten	2019	11.324.588.102.331	11.201.873.129.054	1,010954862
Provinsi Bangka Belitung	2019	2.776.076.365.845	2.694.205.659.655	1,030387697
Provinsi Gorontalo	2019	1.779.814.813.996	1.941.076.769.546	0,916921392
Provinsi Kepulauan Riau	2019	3.153.016.717.443	3.939.451.004.378	0,800369573
Provinsi Papua Barat	2019	5.409.692.414.864	11.339.763.889.679	0,477055119
Provinsi Sulawesi Barat	2019	1.889.369.193.841	2.043.393.479.200	0,924623286
Provinsi Kalimantan Utara	2019	2.131.825.490.532	2.610.072.420.324	0,816768713
Provinsi Aceh	2020	9.899.914.199.650	14.439.920.557.021	0,685593398
Provinsi Sumatera Utara	2020	10.935.643.264.218	12.916.359.750.491	0,846650564
Provinsi Sumatera Barat	2020	5.642.976.228.599	6.364.065.756.244	0,886693577
Provinsi Riau	2020	6.548.368.423.452	8.622.824.848.907	0,759422641
Provinsi Jambi	2020	3.697.514.755.982	4.400.624.372.119	0,840225032
Provinsi Sumatera Selatan	2020	6.900.475.143.744	9.278.520.060.062	0,743704287
Provinsi Bengkulu	2020	2.698.458.077.972	2.786.928.036.208	0,968255385
Provinsi Lampung	2020	5.735.949.754.038	7.019.319.471.883	0,817166077
Provinsi DKI Jakarta	2020	51.716.860.929.662	55.887.004.237.727	0,925382594
Provinsi Jawa Barat	2020	38.127.531.749.249	34.504.275.705.318	1,1050089
Provinsi Jawa Tengah	2020	19.004.867.768.862	25.393.735.934.148	0,74840771
Provinsi DI Yogyakarta	2020			0,774718977

		4.347.344.000.359	5.611.510.924.300	
Provinsi Jawa Timur	2020	26.077.913.616.487	31.631.024.771.618	0,824440998
Provinsi Kalimantan Barat	2020	4.934.552.187.643	5.665.113.367.861	0,87104209
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	4.466.805.961.013	4.767.014.514.749	0,93702378
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	5.387.142.258.883	6.487.758.292.203	0,830354957
Provinsi Kalimantan Timur	2020	5.917.231.922.644	10.133.115.629.662	0,583949906
Provinsi Sulawesi Utara	2020	4.212.357.324.668	3.690.999.513.208	1,141251119
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	3.810.416.446.557	4.106.116.585.245	0,92798545
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	7.646.303.012.993	9.365.471.515.326	0,816435457
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	3.792.420.304.742	4.012.335.036.317	0,945190337
Provinsi Bali	2020	4.916.723.387.079	5.718.339.699.615	0,859816598
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	4.559.487.835.427	5.174.293.221.665	0,881180799
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	5.290.121.484.382	5.419.935.156.637	0,976048851
Provinsi Maluku	2020	2.780.809.725.348	3.045.825.245.458	0,912990569
Provinsi Papua	2020	9.530.922.395.282	13.030.852.042.529	0,731412065
Provinsi Maluku utara	2020	2.500.553.808.563	2.581.177.165.428	0,968764888
Provinsi Banten	2020	8.042.075.183.602	10.334.116.251.227	0,778206379
Provinsi Bangka Belitung	2020	2.203.628.597.880	2.405.260.307.098	0,916170525
Provinsi Gorontalo	2020	1.594.235.283.825	1.862.646.444.966	0,855897955
Provinsi Kepulauan Riau	2020	3.310.488.568.730	35.143.100.183.325	0,094200243
Provinsi Papua Barat	2020	5.343.539.108.825	8.519.361.863.192	0,62722293
Provinsi Sulawesi Barat	2020	1.778.676.294.231	2.005.530.335.280	0,886885759
Provinsi Kalimantan Utara	2020	2.392.576.073.247	2.435.451.724.804	0,982395195

Provinsi Aceh	2021	10.849.062.582.677	13.948.388.273.436	0,777800443
Provinsi Sumatera Utara	2021	13.225.393.166.670	14.034.036.626.479	0,942379838
Provinsi Sumatera Barat	2021	6.468.906.658.345	6.706.053.462.905	0,964636905
Provinsi Riau	2021	7.081.692.940.113	9.383.001.507.905	0,754736417
Provinsi Jambi	2021	3.577.041.039.818	4.725.724.403.283	0,756929676
Provinsi Sumatera Selatan	2021	10.060.730.260.979	9.611.291.244.667	1,046761565
Provinsi Bengkulu	2021	2.880.225.046.731	3.051.751.862.803	0,943793983
Provinsi Lampung	2021	6.001.065.854.900	7.469.469.346.029	0,803412609
Provinsi DKI Jakarta	2021	61.231.460.250.253	65.567.009.199.000	0,933876061
Provinsi Jawa Barat	2021	25.691.797.686.000	36.991.873.224.931	0,694525458
Provinsi Jawa Tengah	2021	25.843.800.193.834	26.633.000.085.963	0,970367593
Provinsi DI Yogyakarta	2021	5.530.173.461.667	5.703.100.309.342	0,969678449
Provinsi Jawa Timur	2021	33.852.938.529.604	34.280.709.120.324	0,987521536
Provinsi Kalimantan Barat	2021	5.156.492.768.186	6.431.288.413.189	0,80178223
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	4.584.753.691.272	5.199.634.633.667	0,881745356
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	5.247.924.014.573	6.623.086.492.762	0,792368335
Provinsi Kalimantan Timur	2021	6.719.024.890.921	10.220.142.967.274	0,657429638
Provinsi Sulawesi Utara	2021	4.352.913.924.432	3.958.016.296.497	1,099771602
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	4.339.507.807.931	4.695.680.785.592	0,92414881
Provinsi Sulawesi Selatan	2021	10.167.278.357.981	10.009.403.475.558	1,015772656
Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	4.495.870.207.049	4.529.251.153.805	0,992629919
Provinsi Bali	2021	5.071.048.657.958	5.923.153.297.395	0,856140033
Provinsi Nusa Tenggara	2021			0,917608024

Barat		4.888.036.273.650	5.326.932.790.704	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	5.100.995.655.111	5.312.446.872.609	0,96019702
Provinsi Maluku	2021	3.818.967.101.289	3.268.117.195.170	1,168552678
Provinsi Papua	2021	14.859.606.462.836	13.885.923.486.851	1,070120146
Provinsi Maluku utara	2021	2.857.135.599.846	2.876.947.984.752	0,993113402
Provinsi Banten	2021	8.232.682.356.853	11.623.305.653.595	0,708290963
Provinsi Bangka Belitung	2021	2.115.893.278.615	2.708.948.673.048	0,781075441
Provinsi Gorontalo	2021	1.663.965.874.845	1.972.986.602.792	0,843374138
Provinsi Kepulauan Riau	2021	3.703.816.047.351	3.809.875.862.443	0,972161871
Provinsi Papua Barat	2021	5.993.616.938.750	7.327.020.310.449	0,818015603
Provinsi Sulawesi Barat	2021	1.815.906.697.868	2.024.671.075.786	0,896889732
Provinsi Kalimantan Utara	2021	2.050.044.253.909	2.609.501.844.014	0,785607513
Provinsi Aceh	2022	12.726.436.523.632	13.713.584.703.596	0,928016766
Provinsi Sumatera Utara	2022	12.509.062.821.349	12.594.412.688.862	0,993223196
Provinsi Sumatera Barat	2022	6.304.434.742.048	6.130.023.203.348	1,028452019
Provinsi Riau	2022	7.020.073.363.793	8.818.669.764.115	0,796046745
Provinsi Jambi	2022	3.847.470.912.375	4.705.588.357.947	0,81763865
Provinsi Sumatera Selatan	2022	9.663.575.726.751	10.036.955.961.133	0,962799455
Provinsi Bengkulu	2022	3.026.385.524.151	2.953.744.560.516	1,024592839
Provinsi Lampung	2022	5.433.259.123.212	6.836.946.972.194	0,794690839
Provinsi DKI Jakarta	2022	64.380.358.560.086	67.290.479.172.308	0,956752862
Provinsi Jawa Barat	2022	19.686.680.222.555	33.236.110.512.395	0,592328041
Provinsi Jawa Tengah	2022	23.950.240.497.405	24.167.935.634.127	0,990992398

Provinsi DI Yogyakarta	2022	5.449.935.625.662	5.531.194.851.402	0,98530892
Provinsi Jawa Timur	2022	31.502.993.060.591	31.904.776.417.444	0,987406796
Provinsi Kalimantan Barat	2022	4.547.369.876.130	6.103.471.493.098	0,745046468
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	5.147.570.980.714	5.466.828.340.418	0,941600991
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	5.260.417.828.045	8.155.596.924.194	0,645007089
Provinsi Kalimantan Timur	2022	7.988.479.154.624	16.804.693.779.013	0,475371897
Provinsi Sulawesi Utara	2022	3.858.758.102.784	3.726.578.804.936	1,035469342
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	4.825.333.666.427	4.895.740.491.702	0,985618759
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	8.958.791.076.580	8.992.799.689.251	0,99621824
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	4.862.530.576.022	4.497.953.162.940	1,081054071
Provinsi Bali	2022	5.248.722.050.820	5.885.778.601.466	0,891763419
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	5.015.229.533.361	5.302.613.771.986	0,945803287
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	4.275.881.784.556	4.426.473.562.255	0,965979289
Provinsi Maluku	2022	3.053.175.364.420	2.915.515.472.448	1,047216313
Provinsi Papua	2022	11.454.657.535.166	11.040.109.011.239	1,037549314
Provinsi Maluku utara	2022	3.028.024.206.079	3.088.705.718.663	0,980353741
Provinsi Banten	2022	8.086.668.711.042	11.205.654.716.542	0,721659637
Provinsi Bangka Belitung	2022	1.945.979.205.203	2.881.466.811.892	0,675343265
Provinsi Gorontalo	2022	1.737.068.520.333	1.848.593.656.988	0,939670281
Provinsi Kepulauan Riau	2022	3.842.586.411.976	3.918.136.426.614	0,98071787
Provinsi Papua Barat	2022	5.625.519.018.430	7.764.412.862.006	0,724526003
Provinsi Sulawesi Barat	2022	1.864.813.748.898	1.894.618.795.334	0,984268579
Provinsi Kalimantan Utara	2022			0,778696578

		2.127.003.331.977	2.731.491.817.452	
Provinsi Aceh	2023	9.597.050.467.983	10.572.492.903.656	0,907737707
Provinsi Sumatera Utara	2023	13.748.313.016.645	12.757.833.199.493	1,077636994
Provinsi Sumatera Barat	2023	6.352.991.353.500	6.263.878.436.852	1,014226476
Provinsi Riau	2023	7.869.997.679.515	10.009.979.591.478	0,786215157
Provinsi Jambi	2023	3.946.815.046.503	4.622.674.042.285	0,853794797
Provinsi Sumatera Selatan	2023	9.653.373.230.507	9.871.340.904.349	0,977919142
Provinsi Bengkulu	2023	3.123.414.680.971	2.991.013.990.544	1,044266156
Provinsi Lampung	2023	7.048.993.246.382	6.987.319.981.739	1,008826455
Provinsi DKI Jakarta	2023	66.770.609.628.414	71.065.534.207.722	0,939563888
Provinsi Jawa Barat	2023	35.513.040.224.353	34.772.844.052.840	1,021286616
Provinsi Jawa Tengah	2023	25.800.341.207.782	25.369.733.556.675	1,016973282
Provinsi DI Yogyakarta	2023	5.705.855.917.726	5.840.561.001.093	0,976936277
Provinsi Jawa Timur	2023	34.284.843.386.828	33.767.866.236.628	1,015309737
Provinsi Kalimantan Barat	2023	6.743.448.956.498	6.294.845.373.832	1,071265227
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	6.326.371.485.915	6.730.216.813.007	0,939995198
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	9.235.842.967.983	9.877.771.018.512	0,935012864
Provinsi Kalimantan Timur	2023	19.724.959.715.481	17.750.987.305.165	1,111203528
Provinsi Sulawesi Utara	2023	3.358.663.215.088	3.538.185.274.966	0,949261543
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	5.021.839.830.907	4.543.640.253.934	1,105245915
Provinsi Sulawesi Selatan	2023	9.484.932.654.740	9.529.048.625.671	0,99537037
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	5.000.414.624.756	4.610.446.114.004	1,084583683
Provinsi Bali	2023	6.607.098.684.698	6.774.061.484.297	0,97535263

Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	5.685.599.632.382	5.798.011.398.325	0,980612014
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	4.460.910.047.258	4.624.897.387.195	0,964542491
Provinsi Maluku	2023	2.984.803.405.000	3.068.566.443.640	0,972702876
Provinsi Papua	2023	5.031.849.735.511	3.733.670.617.987	1,347695137
Provinsi Maluku utara	2023	3.087.449.300.354	3.138.212.391.117	0,983824202
Provinsi Banten	2023	11.814.131.568.477	11.576.544.862.694	1,02052311
Provinsi Bangka Belitung	2023	3.195.190.962.673	2.603.309.223.149	1,227357447
Provinsi Gorontalo	2023	1.900.595.987.884	1.872.487.105.529	1,015011523
Provinsi Kepulauan Riau	2023	4.276.981.449.460	4.170.044.095.409	1,025644178
Provinsi Papua Barat	2023	5.216.401.168.601	4.261.210.554.291	1,22415945
Provinsi Sulawesi Barat	2023	2.032.092.861.107	2.020.337.607.783	1,00581846
Provinsi Kalimantan Utara	2023	3.242.315.178.036	3.091.012.760.999	1,04894914

Lampiran 6. Perhitungan IPM

Daerah	Tahun	IPM
Provinsi Aceh	2019	71,9
Provinsi Sumatera Utara	2019	71,74
Provinsi Sumatera Barat	2019	72,39
Provinsi Riau	2019	73
Provinsi Jambi	2019	71,26
Provinsi Sumatera Selatan	2019	70,02

Provinsi Bengkulu	2019	71,21
Provinsi Lampung	2019	69,57
Provinsi DKI Jakarta	2019	80,76
Provinsi Jawa Barat	2019	72,03
Provinsi Jawa Tengah	2019	71,73
Provinsi DI Yogyakarta	2019	79,99
Provinsi Jawa Timur	2019	71,5
Provinsi Kalimantan Barat	2019	67,65
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	79,91
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	70,72
Provinsi Kalimantan Timur	2019	76,61
Provinsi Sulawesi Utara	2019	72,99
Provinsi Sulawesi Tengah	2019	69,5
Provinsi Sulawesi Selatan	2019	71,66
Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	71,2
Provinsi Bali	2019	75,38
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	68,14
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	65,23
Provinsi Maluku	2019	69,45
Provinsi Papua	2019	60,84
Provinsi Maluku utara	2019	68,7
Provinsi Banten	2019	72,44
Provinsi Bangka Belitung	2019	71,3
Provinsi Gorontalo	2019	68,49
Provinsi Kepulauan Riau	2019	75,48
Provinsi Papua Barat	2019	64,7
Provinsi Sulawesi Barat	2019	65,73
Provinsi Kalimantan Utara	2019	71,15
Provinsi Aceh	2020	73,29
Provinsi Sumatera Utara	2020	73,62
Provinsi Sumatera Barat	2020	74,29
Provinsi Riau	2020	73,67
Provinsi Jambi	2020	72,29
Provinsi Sumatera Selatan	2020	71,62
Provinsi Bengkulu	2020	72,93
Provinsi Lampung	2020	71,04
Provinsi DKI Jakarta	2020	81,92
Provinsi Jawa Barat	2020	72,61
Provinsi Jawa Tengah	2020	71,88
Provinsi DI Yogyakarta	2020	79,95
Provinsi Jawa Timur	2020	73,04

Provinsi Kalimantan Barat	2020	68,76
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	72,62
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	73,09
Provinsi Kalimantan Timur	2020	75,94
Provinsi Sulawesi Utara	2020	73,67
Provinsi Sulawesi Tengah	2020	70,31
Provinsi Sulawesi Selatan	2020	73,08
Provinsi Sulawesi Tenggara	2020	71,61
Provinsi Bali	2020	76,52
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	70,46
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	66,93
Provinsi Maluku	2020	71,34
Provinsi Papua	2020	61,22
Provinsi Maluku utara	2020	69,3
Provinsi Banten	2020	74,41
Provinsi Bangka Belitung	2020	72,74
Provinsi Gorontalo	2020	69,51
Provinsi Kepulauan Riau	2020	77,69
Provinsi Papua Barat	2020	65,94
Provinsi Sulawesi Barat	2020	68,4
Provinsi Kalimantan Utara	2020	71
Provinsi Aceh	2021	73,48
Provinsi Sumatera Utara	2021	73,84
Provinsi Sumatera Barat	2021	74,56
Provinsi Riau	2021	73,89
Provinsi Jambi	2021	72,62
Provinsi Sumatera Selatan	2021	71,83
Provinsi Bengkulu	2021	73,18
Provinsi Lampung	2021	71,25
Provinsi DKI Jakarta	2021	82,25
Provinsi Jawa Barat	2021	72,96
Provinsi Jawa Tengah	2021	72,17
Provinsi DI Yogyakarta	2021	80,22
Provinsi Jawa Timur	2021	73,48
Provinsi Kalimantan Barat	2021	68,99
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	72,81
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	73,45
Provinsi Kalimantan Timur	2021	76,6
Provinsi Sulawesi Utara	2021	74,03
Provinsi Sulawesi Tengah	2021	70,54
Provinsi Sulawesi Selatan	2021	73,38

Provinsi Sulawesi Tenggara	2021	71,82
Provinsi Bali	2021	76,69
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	70,86
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	67,02
Provinsi Maluku	2021	71,55
Provinsi Papua	2021	61,4
Provinsi Maluku utara	2021	69,56
Provinsi Banten	2021	74,68
Provinsi Bangka Belitung	2021	72,96
Provinsi Gorontalo	2021	69,82
Provinsi Kepulauan Riau	2021	77,87
Provinsi Papua Barat	2021	66,11
Provinsi Sulawesi Barat	2021	68,64
Provinsi Kalimantan Utara	2021	71,57
Provinsi Aceh	2022	74,11
Provinsi Sumatera Utara	2022	74,51
Provinsi Sumatera Barat	2022	75,16
Provinsi Riau	2022	74,45
Provinsi Jambi	2022	73,11
Provinsi Sumatera Selatan	2022	72,48
Provinsi Bengkulu	2022	73,68
Provinsi Lampung	2022	73,68
Provinsi DKI Jakarta	2022	82,77
Provinsi Jawa Barat	2022	73,63
Provinsi Jawa Tengah	2022	72,8
Provinsi DI Yogyakarta	2022	80,65
Provinsi Jawa Timur	2022	74,05
Provinsi Kalimantan Barat	2022	69,71
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	73,17
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	74
Provinsi Kalimantan Timur	2022	77,36
Provinsi Sulawesi Utara	2022	74,52
Provinsi Sulawesi Tengah	2022	71,01
Provinsi Sulawesi Selatan	2022	73,96
Provinsi Sulawesi Tenggara	2022	72,38
Provinsi Bali	2022	77,4
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	71,65
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	67,63
Provinsi Maluku	2022	72,04

Provinsi Papua	2022	62,16
Provinsi Maluku utara	2022	70,26
Provinsi Banten	2022	75,25
Provinsi Bangka Belitung	2022	73,5
Provinsi Gorontalo	2022	70,62
Provinsi Kepulauan Riau	2022	78,48
Provinsi Papua Barat	2022	66,72
Provinsi Sulawesi Barat	2022	69,19
Provinsi Kalimantan Utara	2022	72,21
Provinsi Aceh	2023	74,7
Provinsi Sumatera Utara	2023	75,13
Provinsi Sumatera Barat	2023	75,64
Provinsi Riau	2023	74,95
Provinsi Jambi	2023	73,73
Provinsi Sumatera Selatan	2023	73,18
Provinsi Bengkulu	2023	74,3
Provinsi Lampung	2023	72,48
Provinsi DKI Jakarta	2023	83,55
Provinsi Jawa Barat	2023	74,24
Provinsi Jawa Tengah	2023	73,39
Provinsi DI Yogyakarta	2023	81,09
Provinsi Jawa Timur	2023	74,65
Provinsi Kalimantan Barat	2023	70,48
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	73,73
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	74,66
Provinsi Kalimantan Timur	2023	78,2
Provinsi Sulawesi Utara	2023	75,04
Provinsi Sulawesi Tengah	2023	71,66
Provinsi Sulawesi Selatan	2023	74,6
Provinsi Sulawesi Tenggara	2023	72,94
Provinsi Bali	2023	78,01
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	72,37
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	68,4
Provinsi Maluku	2023	72,75
Provinsi Papua	2023	63,01
Provinsi Maluku utara	2023	70,98
Provinsi Banten	2023	75,77
Provinsi Bangka Belitung	2023	74,09
Provinsi Gorontalo	2023	71,25
Provinsi Kepulauan Riau	2023	79,08
Provinsi Papua Barat	2023	67,47

Provinsi Sulawesi Barat	2023	69,8
Provinsi Kalimantan Utara	2023	72,88

Lampiran 7. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	IPM	Y
Mean	0.382599	0.262445	0.056828	72.60965	0.901052
Median	0.376962	0.261315	0.040527	72.77500	0.934444
Maximum	0.735483	0.775355	0.294163	83.55000	1.347695
Minimum	0.033176	0.000000	0.002636	60.84000	0.094200
Std. Dev.	0.167563	0.140762	0.048258	3.927877	0.153343
Skewness	0.088580	0.386897	1.427408	-0.096569	-1.086237
Kurtosis	2.385476	3.010312	5.897329	4.242880	7.044505
Jarque-Bera	2.897266	4.241945	117.1901	11.20621	149.3001
Probability	0.234891	0.119915	0.000000	0.003686	0.000000
Sum	65.04189	44.61559	9.660802	12343.64	153.1788
Sum Sq. Dev.	4.745063	3.348538	0.393568	2607.369	3.973893
Observations	170	170	170	170	170

Lampiran 8. Pemilihan Model

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.572657	(33,132)	0.0387
Cross-section Chi-square	56.368189	33	0.0068

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.980744	4	0.0114

c. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

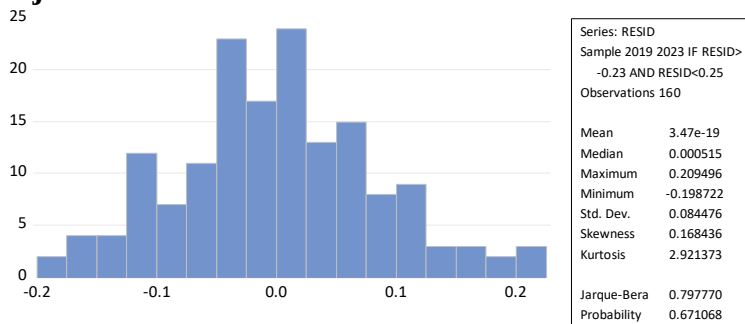
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.207415 (0.6488)	45.77634 (0.0000)	45.98376 (0.0000)
Honda	0.455428 (0.3244)	6.765822 (0.0000)	5.106195 (0.0000)
King-Wu	0.455428 (0.3244)	6.765822 (0.0000)	6.539388 (0.0000)
Standardized Honda	0.899409 (0.1842)	8.162922 (0.0000)	1.404768 (0.0800)
Standardized King-Wu	0.899409 (0.1842)	8.162922 (0.0000)	4.600874 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	45.98376 (0.0000)

Lampiran 9. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABSRESID

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/26 Time: 12:46

Sample: 2019 2023 IF RESID>-0.23 AND RESID<0.25

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (unbalanced) observations: 160

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.186895	0.095821	1.950462	0.0529
X1	0.024152	0.036346	0.664502	0.5074
X3	-0.090149	0.088717	-1.016136	0.3111
X2	-0.039448	0.039222	-1.005751	0.3161
IPM	-0.001574	0.001383	-1.138338	0.2567

c. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	IPM
X1	1.000000	-0.575585	-0.029064	0.606111
X2	-0.575585	1.000000	0.241774	-0.376087
X3	-0.029064	0.241774	1.000000	0.046046
IPM	0.606111	-0.376087	0.046046	1.000000

d. Uji Autokorelasi

R-squared	0.218883	Mean dependent var	0.905828
Adjusted R-squared	0.198725	S.D. dependent var	0.129132
S.E. of regression	0.115591	Akaike info criterion	-1.446764
Sum squared resid	2.071002	Schwarz criterion	-1.350665
Log likelihood	120.7411	Hannan-Quinn criter.	-1.407742
F-statistic	10.85846	Durbin-Watson stat	0.929085
Prob(F-statistic)	0.000000		